

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Februari II Tahun 2022 No. 29

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Amin AK, M.M.

Minyak Goreng Langka

Gencarkan

***Operasi
Pasar!***





Beragam Komoditas Langka, Anehnya Muncul Wacana Pemilu Ditunda

Kemalasan untuk berkompetisi, dicarikan alibi mengambil jalan pintas untuk kalangan sendiri. Secara kolektif, solidaritas koalisi yang menghalalkan semua aturan telah secara potensial mengancam eksistensi demokrasi.

Curah hujan dengan intensitas tinggi telah sebabkan banjir di banyak tempat, bersama dengan itu puluhan orang antri di pinggir jalan untuk mendapatkan minyak goreng yang langka dan harga melambung. Kedelai sulit di dapat, akhirnya sebabkan pengrajin tahu dan tempe naikan harga.

Tidak habis cerita, pedagang daging naikan harga. Tarif tol dalam kota merangkak naik pas lewat tengah malam dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi naik tipis. Masyarakat dipaksa merogoh

kocek lebih dalam di situasi pandemi yang belum pasti.

Pemegang otoritas berdalih kenaikan hanya terjadi pada komoditas non subsidi dan bukan masyarakat bawah. Bukankah pandemi ini telah merontokan ekonomi secara massif, bukan saja kepada yang papa namun juga selama ini yang dianggap berdaya.

Dari seluruh keriuhan tersebut, lalu munculah wacana pemilu ditunda dari pucuk pengambil keputusan politik dengan alasan khawatir mengganggu stabilitas ekonomi. Kita seakan menemukan cara berpikir yang

terputus dengan realitas. simpul yang terlepas dari pasak. Demokrasi bukan sekedar terancam, namun dia akan terjerembab ke titik nadir paling rendah: Potensi Otoritarianisme.

Wacana ini bukan untuk yang pertama kali, bahkan menjadi kesekian kali. Sudah dijawab oleh Presiden berulang kali dalam berbagai kesempatan bahwa dirinya tidak akan menyalahi konstitusi dan menghormati demokrasi.

Tapi rumitnya wacana ini datang bertubi-tubi ditengah pandemi, awalnya diusulkan orang biasa, para aktivis namun kini oleh pengambil keputusan.

Pelaku politik aktif, yang jika salah langkah dan terjebak kepentingan pragmatis akan sangat bahaya. Sedih dan sungguh miris, hingga pada akhirnya banyak pihak menduga wacana penundaan merupakan strategi politik jangka pendek yang mengorbankan sistem secara permanen.

Kemalasan untuk berkompetisi, dicarikan alibi mengambil jalan pintas untuk kalangan sendiri. Secara kolektif, solidaritas koalisi yang menghalalkan semua aturan telah secara potensial mengancam eksistensi

demokrasi.

Kita mengambil keputusan yang bertolak belakang, ditengah dorongan untuk melakukan proses penguatan supremasi sipil.

Kita sedang membuat sejarah yang kelam tentang partisipasi publik, munculnya regenerasi dan kaderisasi bangsa, maupun usaha penguatan institusi publik yang lebih permanen.

Kita sedang menyaksikan ego telah mengalahkan nilai luhur demokrasi. sungguh membuat kita pilu dan malu pada seluruh anak negeri yang telah menggulirkan reformasi.

Komisi II FPKS **Dukung** Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu

KUTIPAN

Jakarta (14/02) - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendukung keterwakilan perempuan minimal 30% di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pemilihan umum serentak tahun 2024.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah tegas dinyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

"Keterwakilan perempuan yang nyata dalam demokrasi ini sangat diperlukan untuk melengkapi arah pembangunan dan menyempurnakan formasi kebijakan yang berkualitas yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan", tegas Mardani dalam Webinar yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI, Senin, (14/02).

Mardani pun menyatakan bahwa Fraksi PKS senantiasa berupaya untuk menjalin

Webinar 'Memastikan Demokrasi Berkualitas Melalui Representasi Perempuan di Politik',

komunikasi dengan seluruh pihak di DPR agar komposisi komisioner di lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan yang diharapkan. "Saya harap setiap anggota dewan bisa menyetujui sehingga ketercapaian 30% itu bisa dicapai. Kami sedang coba mengkomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPR", ujar Anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur ini.

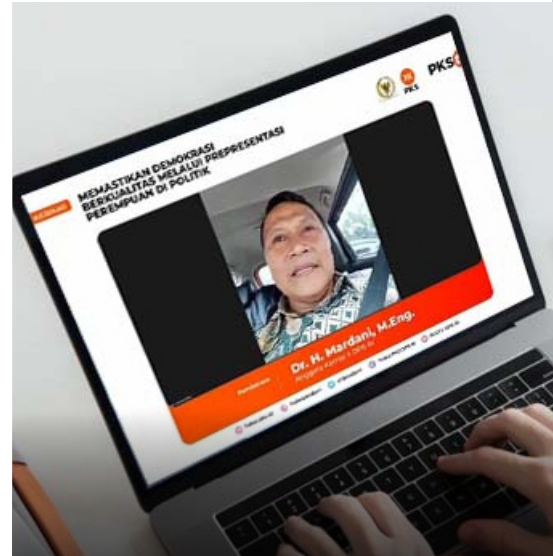
Lebih lanjut, Mardani menjelaskan bahwa Komisi II akan memerhatikan

keterwakilan perempuan sejalan dengan menelaah kemampuan dan kapasitas dari masing-masing calon komisioner.

"Kami tegaskan bahwa seluruh rangkaian ini akan melalui tahap fit and proper test, jangan buat keputusan tanpa fit and proper test. Pokoknya track record akan dilihat dan kita uji di sana." lanjut Anggota Komisi II ini dalam paparannya.

Selain itu, ia menambahkan, kompetensi dan integritas dari calon keanggotaan KPU dan Bawaslu sangat penting dipertimbangkan.

"Yang kedua tolong lihat dari sisi integritas, ketika memiliki integritas maka itu yang harus dipilih. Hal yang tidak kalah penting adalah kapasitas, kompetensi, dan kualitas, bukan dari latar belakang. Harapannya, kita bisa menjadikan KPU dan Bawaslu yang inklusif, berkualitas, dan berintegritas. Sehingga demokrasi yang baik dapat terwujud", tutupnya.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Keterwakilan perempuan yang nyata dalam demokrasi ini sangat diperlukan untuk melengkapi arah pembangunan dan menyempurnakan formasi kebijakan yang berkualitas yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan"

Aleg PKS: **Orang** Keterwakilan Perempuan di KPU-Bawaslu RI untuk Demokrasi Berkualitas

KUTIPAN

Jakarta (14/02) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani Aher mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah politik saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk 'Memastikan Demokrasi Berkualitas Melalui Representasi Perempuan di Politik', Senin siang, (14/02).

"Demokrasi adalah sebuah proses yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi yang berkualitas harus melibatkan rakyat secara substantif dan langsung, termasuk kaum perempuan," ujar Netty.

Lebih lanjut, ia mengatakan upaya mendorong keterwakilan perempuan di politik sebagai langkah strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki menjadi salah satu alasan keniscayaan menghadirkan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik.

Webinar 'Memastikan Demokrasi Berkualitas Melalui Representasi Perempuan di Politik',

"Kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya pada konteks ide atau gagasan, melainkan juga kehadiran fisik. Keberadaannya dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan demokrasi yang berkualitas, pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan serta makin mende-
katkan pada sasarannya, yakni kesejahteraan rakyat sebagai-
mana diamanatkan oleh konst-

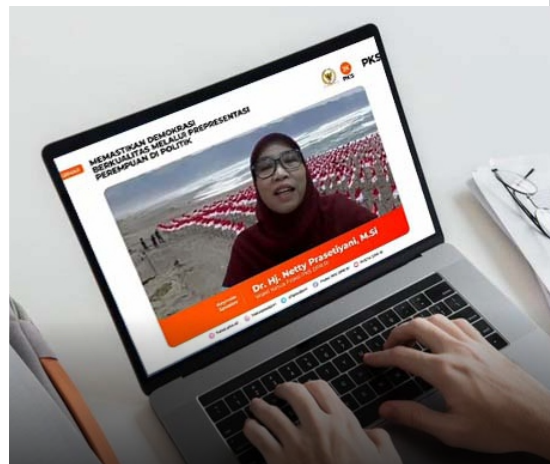
itusi, UUD 1945," tegas Netty.

Anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut juga mengemukakan harapannya agar banyak perempuan yang menemukan jalan suksesnya melalui keterlibatan dalam politik, baik di legislatif, mau pun di lembaga penyelenggara pemilu.

"Dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu RI yang tengah berlangsung di DPR RI, diharapkan setidaknya 30 persen perempuan terpilih. Bukan hanya di pusat, tetapi juga diikuti menempatkan 30 persen perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kota-kabupaten," katanya.

Menurut Netty, perempuan yang aktif di politik seyogyanya membangun kapasitas yang mumpuni agar mampu mengemban jabatan strategis serta menyelesaikan masalah dan menjawab berbagai isu yang sangat dinamis di tengah disrupsi 4.0," ucap Netty.

Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

"KPU dan Bawaslu harus mampu menjadi lembaga yang memastikan hadirnya demokrasi berkualitas, demokrasi yang melayani rakyat. Sebagaimana Bapak Leimena mengatakan bahwa sejatinya politik bukan sekedar alat untuk mencapai kekuasaan, tapi politik adalah seperangkat etika untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia,"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Soal Batasan Usia Pensiun TNI

FPKS: **Wajarnya** Disamakan dengan Polri

KUTIPAN

Jakarta (10/02) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, menanggapi persoalan batas usia pensiun TNI,

yang digugat ke Mahkamah Konstitusi akibat berbeda dengan Polri sehingga dinilai diskriminatif oleh Pemohon.

Menurutnya, jika merujuk pada konstitusi, terdapat tupoksi yang setara antara aparat TNI dan Kepolisian. Oleh sebab itu, maka sewajarnya masa kedinasan antara TNI dan Polri disamakan.

"Merujuk pasal 28D ayat 1, 2, dan 3, dengan tupoksi yang serupa antara aparat Pertahanan & Keamanan, maka aturan terkait masa kedinasan mereka sewajarnya disamakan. Apakah UU Polri yg menyesuaikan dengan TNI atau sebaliknya. Saya kira bagus jika itu diputuskan oleh judicial review MK atau segera dilakukan perubahan UU terkait oleh DPR", ungkap Al Muzzammil.

Politikus senior PKS sekaligus Anggota Badan Legislatif DPR ini juga

menjelaskan sikap PKS soal masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang berpotensi akan berlanjut jika gugatan ke MK tersebut diterima. Mengingat, merujuk pada UU TNI yang berlaku saat ini, masa jabatan Jenderal Andika akan habis pada November 2022 mendatang.

"Kalau kebetulan ada persamaan momentum dengan masa Dinas Jenderal Andika, tidak masalah. Karena jika UU TNI / Polri sdh diubah secara proporsional & obyektif yang mendapat manfaat kan seluruh jajaran TNI & Polri. Bukan hanya menyesuaikan dengan TNI atau sebaliknya. Sebelumnya, Pasal 53 UU 34/2004 tentang TNI digugat ke MK oleh Lima orang warga negara yang salah satunya pensiunan TNI karena para pemohon mendalilkan terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun anggota TNI dengan Polri.



Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Komisi I DPR RI

"Merujuk pasal 28D ayat 1, 2, dan 3, dengan tupoksi yang serupa antara aparat Pertahanan & Keamanan, maka aturan terkait masa kedinasan mereka sewajarnya disamakan. Apakah UU Polri yg menyesuaikan dengan TNI atau sebaliknya. Saya kira bagus jika itu diputuskan oleh judicial review MK atau segera dilakukan perubahan UU terkait oleh DPR"

Permintaan Maaf Pemerintah Belanda Perlu Diikuti dengan Ganti Rugi Keluarga Korban dan Bangsa Indonesia



KUTIPAN

Jakarta (19/02) — Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte pada Kamis (17/2) menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan secara sistematis, melampaui batas, dan tidak etis di Indonesia pada 1945-1950.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan kekejaman penjajah adalah peristiwa pedih yang akan terus tercatat dalam sejarah dan diingat oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian bangsa Indonesia selalu memiliki jiwa besar untuk memberikan maaf.

"Pengalaman pahit menjadi negeri yang pernah dijajah, membuat Indonesia menjadi bangsa yang anti penjajahan. Para founding fathers bangsa ini menegaskan di dalam konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS permintaan maaf pemerintah Belanda atas kekejaman yang pernah dilakukan di Indonesia akan lebih baik jika diikuti dengan tindakan nyata dengan upaya penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta-fakta yang terjadi di masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

"Di lokasi-lokasi yang diyakini menjadi lahan pembantaian Belanda juga perlu dibangun

prasasti atau mesuem, sebagai penghormatan bagi para korban dan sekaligus pengingat bagi generasi berikutnya."

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga berharap pemerintah Belanda yang sudah kenyang menjajah bangsa-bangsa lain di masa lalu, mau menebus kesalahan dengan aktif mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah, seperti Bangsa Palestina yang hingga detik ini dijajah oleh Zionis Israel.

"Akan sangat baik jika pemerintah Belanda bisa memiliki sikap seperti Indonesia yang selalu mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah menuju kemerdekaannya dan tidak pernah mau berteman dengan penjajah. Jika sikap seperti ini mendapat dukungan dari banyak negara termasuk Belanda, tentu cita-cita menghadirkan dunia yang aman dan damai bukan sesuatu yang mustahil."



H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

"Pengalaman pahit menjadi negeri yang pernah dijajah, membuat Indonesia menjadi bangsa yang anti penjajahan.

Para founding fathers bangsa ini menegaskan di dalam konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

Jual Beli Tanah Wajib Punya Kartu BPJS Kesehatan, Aleg PKS: Bentuk Keputusan Pemerintah

KUTIPAN

Jakarta (20/02) -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang mewajibkan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan untuk melakukan transaksi jual-beli tanah. Hal ini disampaikannya dalam keterangan online kepada Detik.com, Sabtu kemarin (19/02).

Menurutnya, aturan itu tidak relevan dan justru kontraproduktif dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berniat memacu roda perekonomian di tengah masyarakat.

"Ini adalah peraturan yang menurut saya tidak proporsional karena akan menyulitkan transaksi, dan di saat yang sama tidak memberikan edukasi kepada publik karena sifatnya pemaksaan. Padahal, transaksi tanah, jual-beli dalam hal ini, adalah salah satu pemutar ekonomi masyarakat yang efektif. Misalnya, untuk pembangunan perumahan. Jual

beli tanah akan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara luar biasa, saat ada kebutuhan untuk material, buruh/pekerja, dan furnitur, dan lain-lain", ungkap Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menjelaskan bahwa aturan tersebut justru menyulitkan proses transaksi karena menetapkan ketentuan lain yang sebelumnya tidak ada.

"Dengan adanya syarat tambahan, ini bertentangan dengan niatnya Presiden Jokowi sendiri, yang notabene dua di antara lima program Pak Jokowi ialah deregulasi dan

debirokratisasi", jelas Ketua DPP PKS tersebut.

Mardani pun menilai bahwa aturan ini adalah bentuk keputusan Pemerintah dalam tujuannya untuk memperkuat BPJS Kesehatan.

"Karena ini sifatnya pemaksaan, bukan edukasi, justru tidak akan memperkuat BPJS Kesehatan. Harusnya ada cara lain untuk kita memperkuat BPJS Kesehatan tersebut, tidak dengan mengaitkannya ke proses jual-beli atau ke persoalan administratif lain, seperti pembuatan KTP dan sebagainya. (Jika ini yang terjadi), itu bisa dilihat sebagai bentuk keputusan Pemerintah dalam bentuk keputusan BPJS Kesehatan", pungkas Mardani.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan syarat baru jual beli tanah, yakni wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Hal ini tertera dalam Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Ini adalah peraturan yang menurut saya tidak proporsional karena akan menyulitkan transaksi, dan di saat yang sama tidak memberikan edukasi kepada publik karena sifatnya pemaksaan. Padahal, transaksi tanah, jual-beli dalam hal ini, adalah salah satu pemutar ekonomi masyarakat yang efektif. Misalnya, untuk pembangunan perumahan. Jual beli tanah akan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara luar biasa, saat ada kebutuhan untuk material, buruh/pekerja, dan furnitur, dan lain-lain",

Fit & Proper Test Komisioner KPU dan Bawaslu

Aleg PKS: **Pastikan** yang Terpilih Tak Tersandera Kepentingan

KUTIPAN

Jakarta (16/02) — Komisi II DPR RI selama tiga hari berturut-turut (14-16 Februari 2022) melakukan fit and proper test Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebanyak 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu akan menjalani uji kelayakan di hadapan Anggota Komisi II.

Anggota Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menegaskan DPR RI harus mampu mencari komisioner yang setia pada tujuan bernegara dan siap bersikap jujur dalam menyelenggarakan Pemilu.

"Kita harus pastikan komisioner KPU dan Bawaslu yang akan terpilih tidak bisa dibeli oleh siapapun, baik perorangan, parpol, istana maupun oligarki," ujarnya disela-sela sidang Komisi II.

"Masyarakat harus turut mengawasi para wakilnya di

DPR, agar tetap komitmen mencari komisioner yang mampu menyelenggarakan Pemilu jujur, adil dan memuaskan rakyat, bukan memuaskan para konglomerat," sambungnya.

Terkait dengan beredarnya daftar nama komisioner terpilih di tengah proses fit & proper test, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur ini sangat menyayangkan.

"Mestinya saat fit & proper test berlangsung, jangan ada spekulasi nama yang dimunculkan. Agar para Anggota DPR RI yang melakukan fit & proper test tetap profesional menyeleksi. Sungguh disayangkan hal ini terjadi, apalagi dilabeli

sebagai kesepakatan partai koalisi," ungkapnya.

Namun Aus Hidayat Nur meminta agar semua pihak tidak terpengaruh dengan nama-nama yang beredar.

"Ini bisa jadi hoaks, karena menyebut partai yg mendukung atau mengusungnya, padahal DPR khususnya komisi dua bekerja untuk demokrasi yang sehat dan jauh dari sikap saling curiga, sehingga ini bila dibiarkan akan menjadi sumber keretakan dan perpecahan yang tidak kita inginkan. Sebaiknya pimpinan Komisi II memberi penjelasan," pintanya.

Politisi PKS ini menghimbau agar masyarakat aktif mengawasi.

"Penting bagi masyarakat untuk mengawasi proses ini, karena ini akan berdampak pada hajatan Pemilu 2024 yang merupakan kepentingan rakyat semua. PKS insyaAllah tetap berjuang agar yang terpilih adalah komisioner yang profesional, bukan pesanan pihak-pihak tertentu," tegasnya.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi II DPR RI

"Kita harus pastikan komisioner KPU dan Bawaslu yang akan terpilih tidak bisa dibeli oleh siapapun, baik perorangan, parpol, istana maupun oligarki, Masyarakat harus turut mengawasi para wakilnya di DPR, agar tetap komitmen mencari komisioner yang mampu menyelenggarakan Pemilu jujur, adil dan memuaskan rakyat, bukan memuaskan para konglomerat"

Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



**Saksikan
Setiap Jum'at**
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Nasir Djamil: Warga Wadas yang Pro Tambang Batu Andesit **Belum Tahu** Besaran Kompensasi



KUTIPAN

Jakarta (16/02) — Kompensasi lahan bagi warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang setuju lahannya dilakukan penambangan batu andesit, belum mendapat kejelasan dari pemerintah.

Begitu diungkap Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dalam diskusi virtual bertajuk "Wadas: Panggilan Kemanusiaan dalam Pembangunan", yang diselenggarakan virtual pada Selasa siang (15/2).

"Yang setuju saja belum mendapat informasi yang utuh berapa ganti rugi pembebasan lahan untuk penambangan batu andesit tersebut," ujar Nasir.

Nasir mengatakan, kejelasan kompensasi yang masih bermasalah ini juga telah dimasukkan ke dalam laporan kunjungan kerja lapangan Komisi DPR RI ke Desa Wadas

beberapa waktu lalu.

"Jadi bayangkan, mereka yang setuju saja masih kabur terkait dengan kompensasi yang akan mereka dapat," imbuhnya.

Dalam kunjungannya ke Wadas, Nasir mencatat sedikit warga yang memang setuju lahannya diambil untuk dijadikan lokasi penambangan batu andesit yang akan dijadikan material pembangunan Bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

"Jumlahnya mayoritas yang tidak setuju," demikian legislator PKS ini menambahkan.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

"Kejelasan kompensasi yang masih bermasalah ini juga telah dimasukkan ke dalam laporan kunjungan kerja lapangan Komisi DPR RI ke Desa Wadas beberapa waktu lalu. Jadi bayangkan, mereka yang setuju saja masih kabur terkait dengan kompensasi yang akan mereka dapat"

Anggota FPKS Minta Pemerintah **Beri Klarifikasi** Lahan Hutan untuk IKN

KUTIPAN

Jakarta (18/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mendesak Pemerintah untuk mengklarifikasi kawasan hutan di lokasi Pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur agar tidak terjadi simpang siur dan tidak terjadi keraguan di tengah masyarakat.

Klarifikasi tersebut, lanjut Hermanto, terutama untuk menjelaskan simpang siur informasi terkait adanya pengusaha yang memiliki lahan di kawasan IKN dalam luasan ratusan ribu hektar, ribuan hektar, ratusan hektar dan puluhan hektar.

"Berita semacam ini perlu divalidasi oleh Pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (18/02).

Menurut Hermanto, saat ini publik sering disodorkan berita tentang permasalahan status lahan hutan di kawasan IKN. Permasalahan simpang siur berita tersebut menyangkut kepemilikan lahan, luas lahan, izin, tata batas, amdal, kontur

tanah, masyarakat adat dan aktivitas tambang di kawasan hutan yang diperuntukkan pembangunan IKN.

"Bila informasi status dan tata kelola kepemilikan lahan di kawasan IKN tidak di tata dengan baik maka akan menjadi persoalan dikemudian hari," papar Legislator dari FPKS DPR RI ini.

Masyarakat, lanjutnya, perlu kejelasan tentang kluster lahan dengan peruntukan kawasan inti seluas 56.180 hektar dan kawasan pengembangan seluas 199.962 hektar total 256.142 hektar.

"Sejauh ini, kawasan tersebut masih merupakan kawasan hutan dengan aneka ragam tumbuhan dan hewan

dengan ekosistemnya. Publik masih mempertanyakan status dan kepemilikannya," papar Hermanto.

Saat ini, katanya, sudah beredar informasi maket bangunan istana.

"Apakah maket tersebut sudah mewakili seluruh bangunan yang diperuntukkan untuk Kementerian ? apakah perlu ada bangunan-bangunan terpisah untuk setiap dan seluruh Kementerian ? . Bila melihat maket tersebut, sepintas tidak dibutuhkan lahan yang terlalu luas," tutur Hermanto.

"Untuk hal tersebut, Pemerintah perlu memberikan informasi yang benar agar tidak terjadi spekulasi opini," tambahnya.

Hermanto mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar betul-betul menata kawasan hutan yang diperuntukkan IKN sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya kerusakan hutan yang berdampak pada lingkungan, perubahan iklim, panas global, manusia dan hewan yang mengakibatkan munculnya biaya rehabilitasi yang lebih besar dibandingkan



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Apakah maket tersebut sudah mewakili seluruh bangunan yang diperuntukkan untuk Kementerian ? apakah perlu ada bangunan-bangunan terpisah untuk setiap dan seluruh Kementerian ? . Bila melihat maket tersebut, sepintas tidak dibutuhkan lahan yang terlalu luas, Untuk hal tersebut, Pemerintah perlu memberikan informasi yang benar agar tidak terjadi spekulasi opini"

biaya pembangunan IKN atau dengan kata lain cost and benefit nya tidak feasible sehingga membebani APBN.

"Juga jangan sampai ada para pelaku usaha perhutanan menguasai lahan hutan yang

sangat luas dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ditengah masyarakat miskin di kawasan hutan yang hanya mengambil manfaat dari hutan untuk kebutuhan hidup," pungkas Legislator Dapil Sumbar I ini.

Harga Kedelai Impor Naik, Aleg PKS Minta Pemerintah segera Intervensi

KUTIPAN

Jakarta (14/02) — Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet menanggapi potensi naiknya harga tahu tempe akibat melambungnya harga kedelai impor.

Slamet menyatakan pemerintah harus segera melakukan intervensi dan pengelolaan yang baik.

"Tahu dan tempe ini bukan saja masalah kebutuhan pedagang tapi juga menyangkut kepada rakyat terutama asupan gizi masyarakat yang paling murah hari ini tahu tempe kedelai. Kalau pemerintah tidak segera intervensi mengelola dengan baik maka masalah ini akan terus berulang dan hal ini bukan yang pertama tapi untuk yang kesekian kalinya," ujarnya di Jakarta, Senin (14/02).

Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah tepat dan strategis serta mencari solusinya diantaranya agar segera merealisasikan pembentukan Badan Pangan Nasional.

Menurut Slamet, akar permasalahannya adalah tidak segera terwujudnya Badan Pangan Nasional.

"Saya juga heran, masalahnya ada di mana, badan ini belum juga terwujud. Padahal sudah 9 bulan perpres sudah di keluarkan presiden. Apakah presiden Jokowi perintahnya sudah tidak berpetuah, akhirnya diabaikan oleh anak buahnya? Ini sudah masalah rutin yang terus berulang setiap tahun, harusnya pemerintah tanggap," tegasnya.

Data Kementerian Pertanian menyebutkan sekitar 86,4 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri berasal dari impor. Hingga 2020, BPS mencatat impor kedelai sebesar 2,48 juta ton dengan nilai mencapai US\$ 1 miliar.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia harus

mengimpor kedelai. Pertama, ucap Slamet, produksi dalam negeri yang rendah. Bahan dalam satu dekade terakhir, produksi kedelai nasional cenderung turun dari 907 ribu ton pada 2010 menjadi 424,2 ribu ton pada 2019.

"Luas lahan panen yang terus menyusut dari 660,8 ribu hektar pada 2010 menjadi 285,3 ribu hektar pada 2019. Hal ini juga dipengaruhi perubahan fungsi lahan ke sektor non-pertanian," sebutnya.

Kedua, imbuh Slamet, kurang berminatnya produsen tempe terhadap kedelai lokal. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan, kualitas kedelai lokal di bawah produk impor.

"Ketiga, petani menganggap budi daya kedelai tidak menguntungkan. Berdasarkan data BPS, harga produksi kedelai di tingkat petani rata-rata sebesar Rp 8.248 per kg. Namun ketika dijual ke konsumen hanya sekitar Rp 10.415 per kg," tutup Slamet



drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

"Tahu dan tempe ini bukan saja masalah kebutuhan pedagang tapi juga menyangkut kepada rakyat terutama asupan gizi masyarakat yang paling murah hari ini tahu tempe kedelai.

Kalau pemerintah tidak segera intervensi mengelola dengan baik maka masalah ini akan terus berulang dan hal ini bukan yang pertama tapi untuk yang kesekian kalinya"

Waspada Inflasi Pangan, Anggota FPKS Minta Mentan Atasi Persoalan Kedelai Jelang Bulan Puasa

KUTIPAN

Jakarta (14/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan Meminta Menteri Pertanian (Mentan) untuk mewaspada inflasi pangan pada tahun 2022 yang diprediksi lebih tinggi.

Menurut Johan, gejala harga pangan tahun 2022 diperkirakan bergerak lebih tinggi dibandingkan 2021.

"Hal ini disebabkan kenaikan konsumsi masyarakat yang belum diimbangi dengan perbaikan rantai pasok yang membuat harga pangan terus bergejolak meskipun pasokan memadai," Hal tersebut disampaikan Johan pada Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin, (14/02).

Johan menuturkan perkiraan inflasi pangan dapat melampaui 3,5% pada tahun 2022 ini yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 lalu yang berada di angka 3,2%.

Pada kesempatan tersebut, Politisi PKS ini

menagih janji Mentan untuk mengatasi persoalan kedelai terkait prediksi inflasi pangan dan naiknya harga tahu tempe menjelang Bulan Ramadhan yang sebentar lagi tiba.

"Bulan Maret ini diprediksi harga tahu tempe bakal melonjak, maka Mentan mesti menunaikan janjinya untuk mengatasi kekurangan produksi dan gejolak harga kedelai sebagai bahan baku utama dari tahu dan tempe", tegas Johan.

"Saya minta Mentan waspada beberapa komoditas pangan yang sering bergejolak terutama pada momen bulan puasa dan lebaran, pemerintah harus menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan melalui produksi dalam negeri, dan negara tidak boleh

sepenuhnya bergantung dengan impor karena saat ini harga pangan dunia yang masih tinggi serta biaya logistic yang belum normal akan selalu berpengaruh pada gejala harga komoditas pangan", urai Johan.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB ini mempertanyakan capaian produksi komoditas kedelai yang hanya 211.265 ton padahal rata-rata kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 2.825.219 ton pada tahun 2021 kemarin.

"Ini artinya pemerintah terus berencana impor kedelai setiap tahun, termasuk tahun 2022 berencana impor kedelai sebesar 2.521.224 ton tanpa ada upaya untuk swasembada. Janji Mentan untuk meningkatkan produksi kedelai dalam dua kali masa tanam akan terus ditagih rakyat", cetus Johan.

Kenaikan harga pangan sangat memukul bisnis UMKM, contohnya keluhan produsen tempe tahu di berbagai daerah atas tingginya harga kedelai sehingga mereka protes atas mahalnya harga kedelai.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya minta Mentan mewaspada beberapa komoditas pangan yang sering bergejolak terutama pada momen bulan puasa dan lebaran, pemerintah harus menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan melalui produksi dalam negeri, dan negara tidak boleh sepenuhnya bergantung dengan impor karena saat ini harga pangan dunia yang masih tinggi serta biaya logistic yang belum normal akan selalu berpengaruh pada gejala harga komoditas pangan"

Akibat Mendag Tak Hadir, Aleg PKS **Kecewa** Rapat Gabungan Tiga Komisi DPR Bahas Pangan Batal

KUTIPAN

Jakarta (18/02) — Ketidakhadiran Menteri Perdagangan menjadi penyebab utama batalnya Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI bersama menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan menteri ESDM pada Kamis, 17 Februari 2022.

Batalnya rapat ini menimbulkan kekecewaan semua peserta atau institusi yang hadir karena begitu pentingnya persoalan pangan yang akan diselesaikan.

Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, Semua pimpinan Komisi DPR dan menteri-menteri lainnya telah hadir kecuali Menteri Perdagangan yang tidak bisa diwakilkan.

Mereka yang hadir ini menurutnya, sudah membatalkan semua agenda untuk bahas penyelesaian persoalan pangan yang sudah lebih 3 bulan terakhir telah menimbulkan gejolak di masyarakat.

Bahkan Pimpinan DPR pun

telah mengosongkan jadwal untuk memimpin rapat karena memang secara aturan rapat gabungan yang memimpin adalah pimpinan DPR.

"Kita semua sangat kecewa dengan pembatalan rapat gabungan ini, selain sebentar lagi memasuki masa reses, sehingga rapat-rapat akan terbentur dengan agenda kunjungan kerja atau kunjungan daerah pemilihan, juga bahwa rapat ini sangat strategis dilakukan sehingga Pengendalian Harga Pangan Pokok dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, bah-

wa pembahasan rapat gabungan ini akan menyisir persoalan hulu hingga hilir salah satunya ada di pupuk baik subsidi maupun pupuk tak bersubsidi.

"Persoalan pupuk ini sudah puluhan tahun masih terus terjadi. Anggaran 15 triliun hingga 32 triliun anggaran pupuk bersubsidi yang pernah dialokasikan di APBN, ternyata masih terus belum berhasil menyelesaikan persoalan pupuk di petani. Pupuk Subsidi kurang, Pupuk non subsidi naik dua kali lipat hingga beredarnya pupuk palsu telah terjadi di lapangan. Efek lanjutan persoalan pupuk ini akhirnya berujung pada penurunan produksi pertanian kita sehingga pemerintah ambil solusi imporasi pangan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi sendiri", kritis Akmal.

Politisi PKS ini menguraikan, Tingginya harga pupuk non Subsidi ini telah memicu incaran para pelanggar untuk menggunakan pupuk bersubsidi, padahal mereka semestinya tidak berhak. Selain itu, alokasi pupuk subsidi 8,87



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Meski ada opsi penundaan rapat di awal sidang setelah reses, atau di masa reses ada sidang khusus, rapat gabungan agar dipercepat karena semakin lama persoalan pangan ini dibiarkan dengan solusi saat ini, kondisi tata kelola pangan kita semakin buruk"

juta ton – 9,55 juta ton yang artinya kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37-42% dengan kebutuhan anggaran Rp 63 triliun – Rp 65 triliun.

"Solusi Pupuk Subsidi ini ganti pola atau penuhi anggarannya. Bahkan menteri ESDM Hadir disini untuk memberi gagasan dan tata laksana memenuhi Pasokan dan Harga Gas Untuk Produksi Pupuk agar efektif dan

efisien. Selama tidak di ganti pola subsidi nya pada kasus pupuk subsidi atau tidak dipenuhi jumlah kebutuhannya, maka selama itu persoalan pupuk akan terus ada sehingga pemenuhan produksi pangan tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akhirnya ambil solusi impor", jelas Akmal.

Selengkap nya kunjungi fraksi.pks.id



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Anggota FPKS: Tak Perbaiki Jalan Rusak, Pemerintah Bisa Digugat

KUTIPAN

Jakarta (16/02) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo prihatin, dengan kerusakan jalan yang akan semakin bertambah ditahun 2022.

Menurut Sigit, masyarakat bisa menggugat pemerintah jika membiarkan jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan.

Hal itu disampaikan Sigit terkait dengan pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyatakan pada 2022 jalan rusak yang ada di Indonesia diprediksi bertambah akibat tidak memadainya anggaran untuk perbaikan jalan.

"Hingga akhir tahun 2021, total jalan nasional yang mengalami kerusakan mencapai 3.848,2 kilometer (km) dan akan terus bertambah karena backlog anggaran. Baru kali ini terjadi kemandapan jalan nasional menurun. Saya prihatin dengan kondisi ini. Bukan hanya akan berdampak pada kelancaran transportasi dan perekonomian, tapi juga bisa dampak pada keselamatan pengguna jalan raya," Kata Sigit yang juga

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI.

Sigit mengatakan kerusakan jalan selama ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kecelakaan, khususnya bagi pengguna kendaraan roda dua. Dengan demikian, kata Sigit, seharusnya preservasi jalan menjadi program prioritas pemerintah dibandingkan dengan proyek mencusuar pemerintah lainnya seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Sigit juga mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi yang lebih memprioritaskan APBN untuk pembangunan jalan Tol ketimbang memenuhi dana preservasi jalan yang menjadi amanat UU.

"Ditengah keterbatasan APBN, seharusnya pemerintah bisa memilah mana program

yang prioritas. Preservasi jalan seharusnya jadi prioritas karena jalan adalah urat nadi perekonomian dan juga menyangkut keselamatan penggunaannya. Tapi, baru di pemerintahan periode ini tol dapat prioritas kukuran APBN ketimbang preservasi jalan. Padahal, pasal 24 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengamankan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika pemerintah tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang, berarti pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan rakyat bisa menggugat dan itu dimungkinkan dalam UU," Kata Sigit.

Berdasarkan Pasal 273 UU LLAJ, setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak sehingga mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga ratusan juta rupiah.

Karena itu, Sigit mengingatkan pemerintah untuk mem-



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

"Ditengah keterbatasan APBN, seharusnya pemerintah bisa memilah mana program yang prioritas. Preservasi jalan seharusnya jadi prioritas karena jalan adalah urat nadi perekonomian dan juga menyangkut keselamatan penggunaannya."

prioritaskan preservasi jalan umum dan jalan nasional. Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBMM) mencatat hingga akhir tahun 2021, total jalan nasional yang mengalami kerusakan mencapai 3.848,2 kilometer (km).

"Backlog atau daftar pekerjaan yang tertunda bidang preservasi jalan dan jembatan

hingga 2022 mencapai Rp 14,9 triliun. Backlog anggaran preservasi jalan terjadi setidaknya sejak 2020. Akibatnya, tingkat kemandapan jalan diprediksi mengalami penurunan 1,09%. Pada 2021 tingkat kemandapan jalan mencapai 91,81%, sedangkan pada 2022 akan turun menjadi 90,71%," tutur Sigit.

Aleg PKS Minta Pemerintah Naikkan Anggaran Kemantapan Jalan Sebagai Wujud **Keadilan Sosial**

KUTIPAN

Tasikmalaya (17/02) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat merasa prihatin dengan prediksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyatakan pada tahun 2022 jalan rusak yang ada di Indonesia akan bertambah.

"Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (15/2/2022) Dirjen Bina Marga sebutkan tingkat kemantapan jalan yang mencapai 91,81% di Tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan 1,09% pada 2022. Menjadi 90,71% karena minimnya anggaran untuk perbaikan dan preservasi jalan. Hal ini sangat disayangkan," imbuh Politisi asal PKS ini.

Pasalinya menurut Toriq pembangunan jalan yang berkemantapan akan meningkatkan rasa persatuan bangsa melalui penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, jalan yang bewalitis juga

akan meningkatkan daya saing dan membangun peradaban bangsa.

"Contoh, ada sebuah wilayah terpencil yang didukung dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, tetapi tetap tidak berkembang. Namun begitu dihubungkan dengan jalan, tanpa program pemberdayaan yang masif, wilayah tersebut berkembang. Jadi fungsi jalan sangat strategis bagi kemajuan," ujarnya.

Selain itu tambah Toriq, penurunan tingkat kemantapan jalan akan berkontribusi pada kenaikan jumlah kasus kecelakaan. Penyebabnya karena kondisi jalanan yang

rusak. Ia mencontohkan kasus kecelakaan di Ibukota. Periode Januari-Mei 2021 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya ada 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kondisi jalanan.

"Kerugian yang dialami pengendara akibat kecelakaan mencapai Rp 1.062.600.000. Idealnya kemantapan jalan di Ibukota berada diatas angka 95 %. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Bukan tak mungkin jumlah kasus kecelakaan akibat jalanan buruk lebih banyak lagi angkanya dalam skala nasional," sebutnya.

Oleh karena Toriq berharap agar Pemerintah meningkatkan kemantapan anggaran untuk pertahankan kemantapan jalan di tahun 2022 dan seterusnya.

"Untuk mencapai tingkat kemantapan tahun ini, sesuai Renstra Ditjen Bina Marga sebesar 95%. Butuh biaya hingga Rp 30,5 triliun," tutup Toriq.

S Dapil Jabar XI (Kota + Kab. Tasikmalaya)



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Penurunan tingkat kemantapan jalan akan berkontribusi pada kenaikan jumlah kasus kecelakaan. Penyebabnya karena kondisi jalanan yang rusak. Ia mencontohkan kasus kecelakaan di Ibukota. Periode Januari-Mei 2021 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya ada 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kondisi jalanan"

Aleg PKS: Pekerja Informal Proyek Jangan Dibebani Iuran JKN

KUTIPAN

Jakarta (21/02) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyampaikan pandangan Fraksi PKS atas Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut Suryadi, instruksi ini berpotensi memberatkan para pekerja proyek di lingkungan KemenPUPR jika iurannya harus dibayarkan sendiri oleh para pekerja proyek.

"Proyek-proyek di KemenPUPR banyak melibatkan pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap, khususnya para pekerja pada proyek-proyek padat karya yang saat ini gencar dilaksanakan oleh KemenPUPR. Jika kepesertaan JKN ini diwajibkan kepada para pekerja informal ini tanpa dimasukkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), maka hal ini justru akan memberatkan para pekerja informal tersebut", ungkap Suryadi

Lebih lanjut, pria yang

akrab disapa SJP ini memaparkan, tanpa adanya penghasilan yang tetap, maka pekerja informal ini berpotensi menunggak pembayaran iuran setelah berakhirnya proyek padat karya tersebut.

"Oleh sebab itu, FPKS berpendapat Pemerintah harus membantu kepesertaan JKN para pekerja informal ini agar dimasukkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran," pungkasnya.

Selain itu, kata SJP, FPKS meminta adanya transparansi pengelolaan dana JKN ini, dan hanya investasikan pada investasi yang aman tetapi yieldnya melebihi Surat Utang Negara (SUN).

"Dan yang paling utama

adalah adanya perbaikan layanan JKN baik terhadap masyarakat sebagai pengguna maupun terhadap pelayan medis, dimana masih terdapat isu tunggakan rumah sakit yang belum dibayarkan", tegas Anggota DPR dari Dapil NTB ini.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Inpres JKN guna mempercepat pencapaian target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar 98% penduduk pada 2024.

Mengingat, per 31 Desember 2021, jumlah peserta JKN baru mencapai 235 juta jiwa atau masih di angka 86 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam rangka pencapaian tersebut, Inpres tersebut memuat instruksi Presiden kepada 30 pimpinan kementerian lembaga, hingga gubernur dan bupati untuk mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing untuk optimalisasi JKN.

Salah satu kebijakan yang muncul adalah instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"FPKS meminta adanya transparansi pengelolaan dana JKN ini, dan hanya investasikan pada investasi yang aman tetapi yieldnya melebihi Surat Utang Negara (SUN). Dan yang paling utama adalah adanya perbaikan layanan JKN baik terhadap masyarakat sebagai pengguna maupun terhadap pelayan medis, dimana masih terdapat isu tunggakan rumah sakit yang belum dibayarkan",

RDPU dengan Perusahaan Obat, Aleg PKS: Minta Kesiapan Layanan Telemedis Hadapi Kenaikan Covid-19

KUTIPAN

Jakarta (14/02) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI dengan Perusahaan-Perusahaan obat-obatan meminta agar ada kesiapan semua pihak dunia kesehatan dalam menghadapi pandemi gelombang ketiga.

Karena menurut Nevi, pemerintah beserta seluruh stakeholder kesehatan sudah berpengalaman sekitar dua tahun melewati pandemi ini.

Nevi mengatakan, ada sekitar lima perusahaan farmasi yang mewakili hadir pada rapat dengar pendapat ini diantaranya, Direktur PT Pro Sehat Indonesia, Chief Executive Officer PT Yes Dok Indonesia, Chief Executive Officer PT Milvik Indonesia, Chief Executive Officer PT Medika Nusantara Digital, dan Deputy Chief Executive Officer PT Link Medis Sehat.

"Saya mengharapkan bahwa ada Kesiapan Layanan

Telemedis Menghadapi Ancaman Kenaikan Covid-19 Varian Omicron terutama kepastian supply obat-obatan dan vitamin yang merata di seluruh Indonesia. Meskipun fatalitas jenis virus omicron ini tidak sebesar varian delta, namun kemampuan sebarannya sangat tinggi sehingga pendukung medis termasuk obat-obatan harus ada merata di seluruh Indonesia sehingga tiap daerah ada persiapan kokoh untuk memberikan pelayanan proses penyembuhan pasien terkonfirmasi COVID-19", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengatakan, bahwa peningkatan kasus COVID-19 ini

perlu diiringi dengan tingkat perawatan di rumah sakit (RS). Meskipun begitu, tingkat perawatan di RS jauh lebih rendah jika dibandingkan saat penyebaran varian Delta di tahun lalu.

"Data harian perawatan pasien COVID-19 per 13 Februari 2022 menunjukkan bahwa ada 27.009 yang dirawat di RS, dengan Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tetap terkendali," sebutnya.

Merujuk informasi dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Nevi Zuairina mengatakan bahwa pasien konfirmasi Omicron tidak membutuhkan perawatan yang serius di RS, hanya perlu menjalani isolasi mandiri di rumah dengan diberikan suplemen vitamin maupun obat terapi tambahan yang telah diizinkan penggunaannya oleh pemerintah.

"Pimpinan perusahaan farmasi yang hadir disini, saya harapkan dapat sinkronisasi dengan pemerintah karena pemerintah akan bekerjasama dengan 17 platform telemed-



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Peningkatan jangkauan pelayanan Telemedis kedepannya harus menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk menjamin atau meminimalisir persoalan di kemudian hari, Semua stakeholder harus mampu menjaga kerahasiaan data pribadi pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menggunakan Telemedis. Jangan sampai ada kasus bocornya data pribadi terjadi pada Telemedis",

cine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah untuk mempercepat

proses kesembuhan. Kebutuhan obat-obatan pasti tinggi jika volumenya se Indonesia", kata Nevi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Minyak Goreng Langka, Anggota FPKS Desak Satgas Pangan **Tindaklanjuti** Temuan Ombudsman

KUTIPAN

Jakarta (11/02) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Satuan Tugas (Satgas) Pangan bergerak cepat menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yang mensinyalir adanya penimbunan minyak goreng.

Aksi penimbunan, kata Amin, telah menimbulkan kekacauan distribusi dan kelangkaan minyak goreng di pasar, baik ritel modern maupun tradisional.

"Ini kok masalahnya berlarut-larut. Meroketnya harga minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan dan saat ini diusul adanya kelangkaan stok. Saya khawatir penyebab sebenarnya karena ketidaktegasan pemerintah," tegasnya.

Amin juga menyesalkan Satgas Pangan yang terkesan lamban mengatasi ketidakmampuan masyarakat membeli minyak goreng dengan harga eceran. Padahal kekacauan distribusi hingga menyebabkan kelangkaan stok di pasar sudah terjadi sejak pertengahan

Januari lalu, usai pemerintah meluncurkan kebijakan minyak goreng satu harga.

"Jika terbukti ada penimbunan, langkah hukum tidak bisa lagi ditawar. Satgas juga harus mengamankan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 6 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng," lanjutnya.

Merujuk Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, imbuh Amin, maka pelaku penimbunan minyak goreng bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp 50 miliar. Selain itu, Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022, ada sanksi

larangan ekspor bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

"Permendag 6/2022 menyebutkan harga eceran minyak goreng curah masing-masing Rp 11.500 per liter, Rp 13.500, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium.

Namun aturan yang mulai berlaku 1 Februari 2022 itu, tidak berpengaruh banyak karena harga minyak goreng masih tinggi," pungkasnya.

Misalnya masih sekitar Rp 18.000 per liter di Aceh, Rp 19.000 per liter di Sumut, Rp 18.000 per liter di Sumbur, Rp 23.000 per liter di Kalimantan Timur, dan Rp 22.000 per liter di Jawa Barat.

"Sementara stok minyak goreng di pengecer modern yang dijual dengan harga eceran tidak ada. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itupun menagih janji Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang akan menugaskan BUMN Pangan ikut mengatasi kelangkaan pasokan.

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Jika terbukti ada penimbunan, langkah hukum tidak bisa lagi ditawar. Satgas juga harus mengamankan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 6 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng"

BUMN Pangan mampu menangani 10-15 persen permintaan pasar minyak goreng," ujar Amin.

Kementerian Perdagangan memperkirakan kebutuhan minyak goreng nasional pada 2022 mencapai 5,7 milyar liter. Untuk kebutuhan rumah tangga,

kebutuhannya sebesar 3,9 milyar liter, terdiri dari produk kemasan premium 1,2 milyar liter, produk kemasan sederhana 231 juta liter, dan minyak goreng curah 2,4 milyar liter. Sedangkan kebutuhan industri sebanyak 1,8 milyar liter.

Harga BBM Non-Subsidi Mahal

PKS: Jangan Naikkan Harga BBM Saat Beban Hidup Rakyat Masih Berat

- PT Pertamina melakukan penyesuaian harga tiga produk BBM non-subsidi per Sabtu (12/2/2022).



Kenaikan Harga

Pertamax Turbo,
Pertamina Dex,
Dexlite

Rp 1.500 s.d
Rp 2.650

Harga per liter
Pertalite Tetap

Rp 7.650 s.d
Rp 8.000

Harga per liter
Pertamax Tetap

Rp 9.000 s.d
Rp 9.400

**HARGA
NAIK**



Dibandingkan dengan Malaysia, **harga BBM Indonesia tergolong mahal** dengan nilai oktan (RON) yang lebih rendah atau setara.

Komparasi Harga BBM



Rp 7.051 (RON 95)



Rp 10.735 (RON 97)



Rp 8.000 (RON 90)



Rp 13.500 (RON 98)

- Apa yang menyebabkan Malaysia bisa menjual BBM dengan harga murah?

Pemerintah Malaysia langsung memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan lebih tinggi, yakni RON 95.

- Anggaran subsidi energi dari dua negara:



2,6% dari APBN



2,43% dari APBN

Rata-rata impor minyak tiap tahun (2010-2019)



213.970 barel/hari



334.790 barel/hari

Aleg PKS Desak Menteri ESDM **Awasi Ketat** Implementasi UU Minerba agar Tak Ditolak Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (17/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan Menteri ESDM perlu mengawasi implementasi UU No. 3/2020 tentang Minerba dan peraturan turunannya, terkait dengan sentralisasi perizinan dari Pemerintah Daerah menjadi ke Pemerintah Pusat.

Menurut Mulyanto, jangan sampai regulasi pertambangan yang baru ini menimbulkan komplikasi sebagaimana yang terjadi di Desa Wadas, Puworejo atau di Moutong, Parigi, Sulteng.

"Dalam UU No. 3/2020 khususnya Pasal 35 sebenarnya diatur, bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan perizinan pertambangan minerba kepada Pemerintah Daerah khususnya terkait izin pertambangan rakyat (IPR) dan surat izin pertambangan batuan (SIPB)," ungkapnya.

Namun dalam PP turunannya, imbuhnya, pilihan yang diambil Pemerintah adalah sen-

tralisasi atas seluruh perizinan tambang minerba melalui mekanisme Perizinan Berusaha.

Mulyanto menengarai berbagai kasus penolakan tambang yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan sentralisasi perizinan tersebut, khususnya dari aspek Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), terutama terkait dengan partisipasi masyarakat.

"Karenanya Pemerintah perlu memeriksa secara akurat berbagai permohonan perizinan tambang yang diajukan sebelum memberikan izin," pungkash Mulyanto.

Pemerintah, tegas

Mulyanto, jangan memudahkan berbagai permohonan perizinan yang masuk sekedar untuk mengejar jumlah investasi di sektor pertambangan namun berujung pada masalah keamanan dan ketentraman masyarakat dan lingkungannya.

"Lebih baik ketat dan akurat di hulu dalam proses perizinan daripada menuai kontroversi di hilir pada saat implementasinya, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan investasi hanyalah salah satu aspek dalam pembangunan sektor pertambangan namun ujung dari pembangunan sektor ini adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Jadi kalau terjadi bentrok antara aparat dan masyarakat sebagaimana mencuat di Desa Wadas, Puworejo atau di Moutong, Parigi, Sulteng, apalagi sampai menimbulkan korban tewas, maka tujuan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu tidak terwujud," terang Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah, jangan memudahkan berbagai permohonan perizinan yang masuk sekedar untuk mengejar jumlah investasi di sektor pertambangan namun berujung pada masalah keamanan dan ketentraman masyarakat dan lingkungannya. Lebih baik ketat dan akurat di hulu dalam proses perizinan daripada menuai kontroversi di hilir pada saat implementasinya, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,"

"Pemerintah harus menangani persoalan ini secara sungguh-sungguh, sehingga kasus-kasus penolakan tambang

di atas tidak terulang di tempat lain," imbuah Mulyanto mengakhiri.

Sesuai Konstitusi dan Prinsip Toleransi, HNW: **Wajar** MK Kembali Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama

KUTIPAN

Jakarta (14/02) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan kenegarawanan dengan kembali menolak uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah UU No. 16 Tahun 2019.

Hidayat menambahkan uji materi UU tersebut harus ditolak karena terkait dengan pernikahan beda agama dan tidak menjustifikasi pelanggaran terhadap prinsip toleransi dan pelanggaran hukum dengan mengabulkan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan konstitusi.

“Aturan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sudah sesuai dengan aturan konstitusi, prinsip HAM dan Toleransi antar

Ummat beragama. Jadi sudah selayaknya bila MK menolak uji materi tersebut. Apalagi MK telah menolak permohonan sejenis pada tahun 2015. Dan sejak saat itu hingga hari ini, tidak ada hal baru yang mengubah ketentuan UU dan Agama (Islam) yang merubah ketentuan larangan pernikahan Laki-laki non Muslim dengan Perempuan Muslimah,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (11/02/2022).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa pasca amandemen UUD NRI 1945 pada 2002 lalu, UUD NRI 1945

telah secara paripurna mengatur relasi antara hak asasi manusia (HAM) dan ajaran agama di masyarakat Indonesia yang religius. Selain dari ketentuan prinsip pada pasal 29 ayat 2, melaksanakan ajaran Agama termasuk pernikahan yang sah, diakui sebagai HAM yang dilindungi (pasal 28 B ayat 1 dan pasal 28 E ayat 1).

“Tetapi pasal-pasal itu tidak berdiri sendiri, bahkan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di UUD NRI 1945 sekalipun, karena pasal-pasal soal HAM itu ditutup dengan pembatasan yang termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu pertimbangan pelaksanaan HAM adalah UU dan nilai-nilai agama,” ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Memaksakan pernikahan yang tidak sesuai dengan UU dan ajaran agama (dalam hal ini Islam) adalah juga bentuk intoleransi terhadap Umat Islam yang mempunyai sikap sesuai ajaran Agamanya, yang dibenarkan oleh UU seperti UU tentang Perkawinan. Maka ditengah menguatnya ajakan untuk toleransi, dan pentingnya taat konstitusi, penting agar MK tidak melegitimasi hal yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 ini, apalagi yang bisa menjadi dalih membenaran intoleransi”

Bantuan Sosial Sembako Bisa Dicairkan Secara Tunai, Aleg PKS: **Berpotensi Langgar Aturan!**

KUTIPAN

Jakarta (21/02) -- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, H. Iskan Qolba Lubis, menilai pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebut bahwa Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) bisa dicairkan secara tunai, berpotensi tidak tepat sasaran dan menyalahi aturan.

"Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini belum maksimal terdistribusi secara merata di berbagai daerah, khususnya di wilayah terpencil. Saya rasa jika nantinya BPNT ini dicairkan dalam bentuk tunai, maka dikhawatirkan penggunaan bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Bisa saja dana bantuan tersebut sudah dicairkan, tetapi tidak digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga, melainkan di belanjakan kebutuhan yang lain nya", ujar Iskan.

Politisi asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial tidak

konsisten dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

"Di Pasal 1 Ayat 4, disebut bahwa BPNT adalah Bantuan Sosial yang di salurkan secara non-tunai dari pemerintah, yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah di tentukan di e-warung. Karena itu, saya rasa jika BPNT ini bisa dicairkan dalam bentuk tunai, maka akan banyak penyalahgunaan yang terjadi pada program BPNT tersebut", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga

meminta kepada Kementerian Sosial agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan di cairkan secara tunai perlu dievaluasi terlebih dahulu.

"Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bisa di cairkan secara tunai ini perlu ada evaluasi. Karena tujuan program ini salah satunya adalah untuk bisa mengembangkan UKM di daerah dan memberdayakan penerima manfaat. Oleh sebab itu, perlu ada kepastian disini terhadap penerima manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai yang di cairkan secara tunai tersebut", tambahnya.

Selain itu, agar tepat sasaran, Iskan menyarankan agar pelaksanaan penyaluran BPNT melibatkan instansi lain, semisal BPK.

"Saran saya, mintalah juga pendapat ke BPK, sehingga penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang bisa dicairkan secara tunai harus diawasi. Sehingga diharapkan nantinya bisa benar dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga", pungkasnya.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bisa di cairkan secara tunai ini perlu ada evaluasi. Karena tujuan program ini salah satunya adalah untuk bisa mengembangkan UKM di daerah dan memberdayakan penerima manfaat. Oleh sebab itu, perlu ada kepastian disini terhadap penerima manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai yang di cairkan secara tunai tersebut",

Anggota FPKS **Komitmen** Perjuangkan Biaya Haji yang Tak Beratkan Calon Jemaah

KUTIPAN

“Sejauh ini angka tersebut baru sebatas usulan pemerintah dan belum dibahas mendalam oleh panitia kerja DPR. Fraksi PKS di Komisi VIII DPR tentunya berharap agar biaya haji pada tahun ini, jika jadi dilaksanakan, dapat lebih rasional dan terjangkau oleh masyarakat,” ucap Bukhori di Jakarta, Sabtu (19/02).

Jakarta (19/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengatakan Fraksi PKS berkomitmen memperjuangkan biaya haji yang terjangkau dan rasional bagi calon jemaah.

Hal tersebut disampaikan merespons kenaikan biaya haji tahun 2022M/1443H yang mencapai Rp45 Juta.

Bukhori juga menjelaskan nominal Rp45 Juta tersebut merupakan usulan pemerintah terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

“Sejauh ini angka tersebut baru sebatas usulan pemerintah dan belum dibahas mendalam oleh panitia kerja

DPR. Fraksi PKS di Komisi VIII DPR tentunya berharap agar biaya haji pada tahun ini, jika jadi dilaksanakan, dapat lebih rasional dan terjangkau oleh masyarakat,” ucap Bukhori di Jakarta, Sabtu (19/02).

Ketua DPP PKS ini menyatakan Komisi VIII DPR RI akan kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan biaya haji tahun 2022M/1443H dalam agenda rapat kerja dengan Kementerian Agama dalam waktu dekat.

“Terlebih, Kementerian Agama juga belum menyampaikan usulan Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Komisi VIII DPR dan baru sebatas usulan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang telah dipaparkan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, lanjut Bukhori, pihaknya meminta supaya Kementerian Agama segera menyampaikan usulan BPIH karena merupakan instrumen penting dan basis dalam menemukan angka Bipih.

“Saat pembahasan dengan Menteri Agama kita akan coba pastikan secara detail terkait komponen apa saja yang membuat biaya haji naik cukup tinggi. Pasalnya, perlu diakui bahwa kenaikan ini cukup memberatkan bagi sebagian calon jemaah haji,” pungkasnya.

Sebagai informasi, biaya haji tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, biaya haji berada pada kisaran Rp31-38 Juta, sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp44,3 Juta.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Saat pembahasan dengan Menteri Agama kita akan coba pastikan secara detail terkait komponen apa saja yang membuat biaya haji naik cukup tinggi. Pasalnya, perlu diakui bahwa kenaikan ini cukup memberatkan bagi sebagian calon jemaah haji,”



Politisi PKS Kritik Aturan Kemenag Soal Pengeras Suara Masjid

KUTIPAN

Jakarta (22/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengkritik kebijakan terbaru Kementerian Agama mengenai panduan pemakaian pengeras suara (speaker) di masjid/musala

yang diatur dalam Surat Edaran No.5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Bukhori menilai, secara substansi pedoman tersebut seolah mengabaikan dinamika kondisi sosiologis dan kultural masyarakat setempat mengingat jangkauan dari edaran tersebut tidak hanya dialamatkan kepada masjid atau musala yang berada di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan.

“Penggunaan pengeras suara di masjid adalah tradisi umat Islam di Indonesia. Bagi masyarakat tradisional yang komunal, mereka relatif memiliki penerimaan yang lebih positif terhadap tradisi melantunkan azan, zikir, atau

pengajian dengan suara keras melalui speaker masjid. Selain alasan bahwa di dalam budaya komunal setiap dalam individu terkonstruksi secara alamiah untuk mengutamakan kepentingan umum, tradisi tersebut juga tidak menemukan masalah ketika diterapkan di lingkungan yang homogen seperti pedesaan,” jelas Bukhori di Jakarta, Senin (21/02/2022).

Politisi PKS ini mengatakan, dalam konstruksi kebudayaan masyarakat di pedesaan, bunyi keras tersebut telah menjelma sebagai ‘soundscape’ atau bunyi lingkungan, sehingga apabila frekuensi ataupun kapasitas dari bunyi tersebut berkurang, melemah, bahkan menghilangkan,

maka dapat berpengaruh terhadap suasana kebatinan penduduk yang biasa terpapar oleh lantunan suara yang berasal dari masjid/musala, walaupun dilakukan secara bersahut-sahutan dengan volume yang keras.

“Seperti ada bagian yang hilang dalam keseharian hidup mereka,” ungkapnya.

Namun demikian, Bukhori mengamini bahwa fenomena yang dianggap lazim di pedesaan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh penduduk perkotaan yang hidup dalam suasana heterogen, individualistik, serta bising, sehingga ketenangan menjadi hal yang didambakan di tengah hiruk pikuk kehidupan metropolitan.

“Dalam kondisi itu, pengaturan pengeras suara pada tingkat yang proporsional menjadi hal yang perlu dilakukan. Selain demi menjaga harmoni sosial di lingkungan yang heterogen, juga penting untuk menjaga simpati masyarakat atas kegiatan keagamaan yang dilakukan. Meski demikian, mewujudkan hal itu sesungguhnya tidak perlu dilakukan secara eksektif, misalnya melalui intervensi negara yang mencampuri hingga urusan teknis soal peribadatan, tetapi cukup berangkat dari rasa kesadaran dan keterbukaan pikiran masyarakat, khususnya bagi pihak takmir masjid atau pengurus DKM,” ucapnya.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Penggunaan pengeras suara di masjid adalah tradisi umat Islam di Indonesia. Bagi masyarakat tradisional yang komunal, mereka relatif memiliki penerimaan yang lebih positif terhadap tradisi melantunkan azan, zikir, atau pengajian dengan suara keras melalui speaker masjid.”

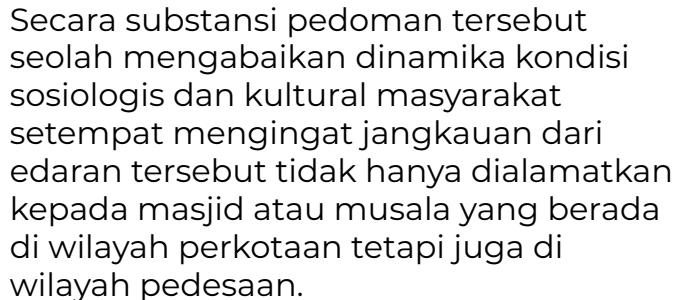
Terkait dengan pentingnya mendukung inisiasi masyarakat dalam mewujudkan harmoni sosial, Bukhori lantas mengambil contoh inisiatif baik yang dilakukan oleh umat Islam di Bali yang tidak menggunakan pengeras suara ketika umat Hindu memperingati hari raya Nyepi dalam rangka penghormatan dan toleransi.

Begitupun sebaliknya dengan umat Hindu yang memaklumi penggunaan pengeras suara yang bersahutan oleh sejumlah masjid di Bali ketika menyambut peringatan hari raya Idul Fitri/Adha meskipun jumlah penganut muslim minoritas di sana.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Tidak Perlu Eksesif



Anggota Komisi VIII DPR RI



BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Anggota FPKS: Ini Mengejutkan!



KUTIPAN

Jakarta (21/02) — Lahirnya Inpres No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional disebut mengejutkan karena melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga dan menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam banyak urusan administrasi layanan publik.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menanggapi terbitnya Inpres No 1 Tahun 2022 tersebut.

"Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian/lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi," terang Mufida dalam keterangannya, Senin (21/02).

Mufida menyebut dalam aturan tersebut bukan hanya menjadi syarat soal jual beli tanah saja, tapi banyak urusan yang mewajibkan persyaratan wajib memiliki BPJS Kesehatan. Seperti diantaranya pengurusan SIM, STNK, SKCK di kepolisian, daftar haji dan umrah, pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengajuan izin usaha termasuk petani dan nelayan penerima program bantuan.

Bagi Mufida, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah kepesertaan BPJS

Kesehatan dibanding menjadi persyaratan di banyak tempat dan berkaitan dengan banyak kementerian dan lembaga lain.

"Pertama bisa dilakukan dengan optimasi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat khususnya yang belum jadi peserta. Kemudian justru seharusnya ada regulasi yang menjamin semua masyarakat tidak mampu dan miskin dijamin menjadi anggota PBI sehingga membuat masyarakat tidak mampu merasa terproteksi dan tercukupi pembiayaan jaminan kesehatannya," ungkap dia.

Ketiga, papar Mufida, yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan baik oleh BPJS Kesehatan maupun Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang menerima penggunaan BPJS Kesehatan.

"Lewat peningkatan kualitas layanan BPJS dan di Fasyankes akan meningkatkan manfaat ke masyarakat sehingga mereka akan bersemangat menjadi anggota karena melihat nyata dan bagus manfaatnya," ungkap dia.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian/lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi,

Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Aleg PKS: **Cederai Rasa Kemanusiaan dan Tak Peka Kondisi Pekerja**

KUTIPAN

Jakarta (12/02) — Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menuai reaksi, bahkan petisi penolakan dari kalangan pekerja.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut peraturan tersebut.

"Muatan permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi," katanya dalam rilis media, Sabtu, (12/02).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, ada beberapa pasal dalam permenaker yang muatannya menunjukkan ketidakpekaan pemerintah pada situasi pandemi yang membuat pekerja ter-PHK.

"Misalnya, aturan mengenai penerimaan manfaat

Jaminan Hari Tua yang baru diberikan kepada peserta setelah berusia 56 tahun. Bayangkan, seorang peserta harus menunggu 15 tahun untuk mencairkan JHT-nya jika ia berhenti di usia 41 tahun. Ini tidak masuk akal," ujar Netty.

Menurut Netty, aturan tersebut berlaku pada peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Dan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021, total klaim peserta yang berhenti bekerja karena pensiun hanya 3 persen, sedangkan pengunduran diri 55 persen dan alasan terkena PHK

mencapai 35 persen.

"Berhenti bekerja karena PHK tentu bukan keinginan pekerja. Berhenti karena pengunduran diri pun bisa karena situasi di tempat kerja yang sudah tidak nyaman. Jadi, mengapa JHT yang sebagiannya merupakan tabungan peserta ditahan pencairannya? Bukankah dana yang tidak

seberapa tersebut justru dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup di masa sulit ini. Jika harus menunggu sampai usia 56 tahun, bagaimana keberlangsungan pendapatan pekerja?", tanya Netty retoris.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah mencabut peraturan tersebut sebagai bukti empati dan keberpihakan pada pekerja di tengah pandemi yang berdampak pada pemiskinan rakyat.

"Apalagi, gelombang PHK dan merumahkan pekerja makin besar. Ini menjadi gambaran betapa pandemi menggerus kemampuan ekonomi keluarga Indonesia. Jika pemerintah tidak menggubris peringatan ini, saya khawatir tekanan hidup dan kesulitan akan membuat



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah harus dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik. Lakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh jika menyangkut regulasi yang pasti akan menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat secara luas"

rakyat semakin keras menolak dan melawan pemberlakuan peraturan tersebut," tandas Netty.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyam-

paikan, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK hingga akhir 2021 sebanyak 143.065 orang.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tolak Permenaker 2 Tahun 2022 tentang JHT, Anggota FPKS: **Jangan Rampas Hak Rakyat**

KUTIPAN

Jakarta (12/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, menyayangkan kebijakan Pemerintah yaitu Permenaker No 2 tahun 2022, yang menyakiti hati rakyat terkhusus para buruh.

"Peraturan ini menambah penderitaan rakyat dan menyakiti hati rakyat, karena peraturan tersebut mempersulit buruh sebab, jika seorang buruh yang mengundurkan diri atau di PHK membutuhkan uang JHT. Tapi ia harus menunggu sampai berusia 56 tahun," ucap Alifudin, Sabtu (12/02/2022).

Alifudin pun berharap kepada pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dan segera meninjau ulang kembali pasalnya permenaker 2 tahun 2022 ini akan berdampak langsung terhadap para buruh.

"Pemerintah baiknya sebelum membuat keputusan, mendengarkan dulu aspirasi rakyat khususnya buruh, agar kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah tidak selalu menimbulkan kontroversi yang menambah penderitaan rakyat," ujar Alifudin.

Alifudin juga meminta kepada pemerintah agar BPJS Ketenagakerjaan di Audit Forensik Keuangannya oleh auditor independen karena uang yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan ini penting.

"Seharusnya pemerintah mampu memberikan dana JHT yang diambil oleh rakyat seperti peraturan sebelumnya yang bisa menunggu 1 bulan pasca mengundurkan diri atau PHK, bukan harus menunggu sampai 56 tahun," tambah Alifudin.

Bang Alif sapaan akrabnya, juga meminta kepada pemerintah jangan menambah beban serta pikiran rakyat

khususnya buruh, yang sebelumnya ada UU Cipta Kerja lalu Soal aturan upah dan sekaran soal Jaminan Hari Tua.

"Kita semua juga sangat berharap dan meminta kepada pemerintah agar fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat agar hidup dengan kemakmuran" tegas alifudin

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis aturan baru pencairan dana jaminan hari tua (JHT). Dalam aturan itu dana JHT baru dapat dicairkan saat pegawai berusia 56 tahun.

Ketentuan itu dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.



H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah baiknya sebelum membuat keputusan, mendengarkan dulu aspirasi rakyat khususnya buruh, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selalu menimbulkan kontroversi yang menambah penderitaan rakyat,"

PHK Dipermudah,
JHT dipersulit

PKS: Cabut Permena- ker JHT Hak Milik Pekerja

Desain : Aditya Angga



- Berdasarkan **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022** tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang disahkan pada 4 Februari 2022 lalu, bahwa manfaat **pembayaran JHT baru bisa dicairkan saat peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.**
- Padahal **di peraturan sebelumnya** di Permenaker No.19 Tahun 2015, bahwa **manfaat JHT dapat diambil setelah masa tunggu 1 bulan** pasca terbitnya surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari perusahaan.



- Per 7 Agustus 2021 **538.305** orang telah terkena PHK
- Kemnaker memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 **894.579** orang bisa terkena PHK

- Klaim BPJS Ketenagakerjaan melonjak signifikan akibat Covid-19. Peningkatan ini seiring banyaknya PHK dan angka kematian selama pandemi.

Total klaim JHT berdasar tahun

2021 : Rp 42,89 triliun
2020 : Rp 36,45 triliun
2019 : Rp 29,70 triliun
2018 : Rp 27,6 triliun

Bahas Isu Krusial di RUU SKN, Aleg PKS: Isu Kesejahteraan Atlet hingga Olahraga Penyandang Disabilitas **Tuntas**

KUTIPAN

Jakarta (15/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyatakan RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang akan disahkan menjadi UU Keolahragaan, akhirnya rampung dibahas.

“Sekarang dibutuhkan keseriusan stakeholder Pemerintah dan pelaku olahraga di tanah air untuk menjalankan regulasi ini secara penuh, karena tidak mudah,” ujar Fikri usai rapat pengambil-an keputusan pembahasan tingkat 1 RUU tersebut di DPR, Senin (14/02/2022).

Menurut Fikri, isu pertama adalah soal perubahan nomenklatur olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat.

“Sebagai bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), RUU ini menekankan, pembangunan nasional di

bidang keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, maka disepakati penggunaan kata olahraga masyarakat,” terang Politisi PKS ini.

Terkait isu kesejahteraan bagi pelaku olahraga nasional, UU ini mengatur penguatan olahragawan sebagai profesi, dan pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaannya.

“Bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, dan kewarganegara-

an, melainkan juga perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” imbuh Fikri.

Dalam hal pendanaan, RUU ini mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan, yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non-pemerintah sebagai wali amanat.

“Bantuan dana olahraga langsung ke cabang olahraga untuk di pusat. Adapun untuk di daerah bantuan dana olahraga bisa melalui KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui hibah,” ujarnya.

Selain itu, dalam hal kelembagaan KONI-KOI, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI, serta penguatan sinergitas KONI-KOI, dimana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi ke KOI untuk mengirim atlet ke ajang internasional, dan KOI



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Sebagai bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), RUU ini menekankan, pembangunan nasional di bidang keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, maka disepakati penggunaan kata olahraga masyarakat,”

harus melaksanakan rekomendasi KONI tersebut.

“Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara kedua Lembaga tersebut,” imbuh Fikri.

Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, imbuhnya,

dalam UU ini adanya pengaturan mengenai desain besar olahraga nasional untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator PKS: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Belum Memuaskan

KUTIPAN

Jakarta (10/02) --- Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV-2021 dan secara kumulatif tahun 2021 yang diumumkan oleh BPS menurut anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati masih jauh dari kata memuaskan.

"Perbandingan ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y), sedangkan secara kumulatif perekonomian Indonesia tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 3,69 persen".

Menurut Ketua Bidang Ekonomi Dan Keuangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 5% karena trend windfall yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya akibat terkontraksi.

Windfall sendiri adalah merupakan pajak yang dipungut pemerintah terhadap industri tertentu ketika kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut mengalami keuntungan di atas rata-rata.

"Melihat trend windfall harga barang komoditas terutama CPO dan Batu Bara dan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yang low base masih terkontraksi sebesar 2,07%, seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 5%," katanya.

Lebih rinci Anis menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 masih ditopang oleh belanja Kesehatan dalam menghadapi Covid-19 khususnya varian Delta pada pertengahan tahun.

"Ditandai dari sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46 persen. Tetapi sektor manufaktur dan industri pengolahan

belum tumbuh seperti yang diharapkan," pungkasnya.

Legislator asal Jakarta ini menuturkan, terhambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tidak bisa dilepaskan dari lemahnya antisipasi Pemerintah dalam menghadapi varian Delta pada Triwulan III-2021.

"Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa, khususnya barang-barang komoditas pertambangan dan perkebunan sebesar 24,04 persen, diikuti Komponen belanja Pemerintah sebesar 4,17 persen," ujarnya.

Sedangkan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 3,80 persen, baru kemudian Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,02 persen.

"Rendahnya pertumbuhan belanja Pemerintah dan Konsumsi rumah tangga, menandakan bahwa akselerasi stimulus PEN tidak optimal, hal ini terlihat dari daya serap PEN sepanjang tahun 2021 hanya mencapai 88 persen, itupun ada indikasi mislokasi dana PEN digunakan untuk BUMN sebesar Rp 33 triliun" tegas Wakil Ketua BAKN DPR RI ini.

Menurut Anis, pada tahun 2022 Indonesia menghadapi tantangan tidak ringan.

Ancaman inflasi mulai terasa, terutama dari kenaikan harga LPG Non-Subsidi, minyak goreng, serta bahan makanan.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Melihat trend windfall harga barang komoditas terutama CPO dan Batu Bara dan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yang low base masih terkontraksi sebesar 2,07%, seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 5%,"

"Inflasi diperkirakan akan menggerus daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah.

Pada saat yang sama pembukaan lapangan pekerjaan masih belum pulih seperti sebelum terjadinya Covid-19," katanya.

Kondisi tahun 2022 akan semakin berat, mengingat Pemerintah mulai mempersiapkan-

kan konsolidasi fiskal untuk memasuki defisit anggaran kembali normal dibawah 3% dalam APBN 2023. Ruang fiskal yang dimiliki pemerintah semakin tertekan akibat dari beban bunga utang yang dikeluarkan semakin besar.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Pembahasan RUU TPKS di Masa Reses, Aleg PKS Minta Pimpinan DPR Tegakkan Tata Tertib

KUTIPAN

Jakarta (19/02) — DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dari pemerintah.

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI menyebut DIM dari pemerintah rencananya akan dibahas selama masa reses Anggota DPR yang dimulai sejak Jumat (18/2/2022) dan mengaku telah mendapat izin dari pimpinan DPR.

Merespons hal itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengingatkan pimpinan DPR agar menjaga anggotanya tertib hukum dalam melaksanakan praktik legislasi demi menjaga maruah DPR selaku lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Bukhori meminta pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan memperhatikan tata tertib yang sudah diatur dalam Peraturan DPR.

Mengacu pada Peraturan DPR tentang Tata Tertib, di

dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 13 disebutkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Sedangkan kegiatan pembahasan RUU di Badan Legislasi DPR, menurutnya, merupakan kegiatan rapat yang semestinya dilakukan pada Masa Sidang.

"Jika benar demikian, saya meminta pimpinan tidak asal memberikan izin pembahasan RUU TPKS di luar masa sidang mengingat pada masa reses para anggota semestinya melakukan giat di luar parlemen, baik untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, menyerap aspirasi, maupun mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada konstituen di dapil," ucap

Bukhori di Jakarta, Jumat (18/02/2022).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan jika rencana membahas RUU TPKS jadi dilaksanakan pada masa reses, maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Tata Tertib DPR.

Bukhori menambahkan, kendati di dalam Peraturan DPR tidak memuat larangan membahas RUU di masa reses, namun secara etika kelembagaan pimpinan DPR diharapkan dapat menegakan tata tertib dan konsisten terhadap peraturan yang telah disusun oleh lembaganya.

"Kami tidak ingin praktik legislasi yang tidak baik sebagaimana terjadi pada pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU IKN kembali terulang pada RUU TPKS. Selain tidak ada situasi kegentingan yang memaksa dan demi menghindari ketergesaan yang dapat berdampak pada lemahnya aturan yang dibuat,

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Kami tidak ingin praktik legislasi yang tidak baik sebagaimana terjadi pada pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU IKN kembali terulang pada RUU TPKS. Selain tidak ada situasi kegentingan yang memaksa dan demi menghindari ketergesaan yang dapat berdampak pada lemahnya aturan yang dibuat, memaksakan pembahasan RUU TPKS di masa reses terkesan menunjukkan gaya ugal-ugalan pembuat undang-undang ketimbang menjiwai etika berpolitik dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang akan berdampak luas bagi masyarakat"

Banjir Tak Kunjung Usai, Aleg PKS: Pemerintah Harus **Segera Selesaikan!**

KUTIPAN

Jakarta (18/02) - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mendesak Pemerintah untuk segera menangani banjir yang sudah dua bulan tak kunjung usai di Lamongan. Hal itu disampaikannya menjelang mengikuti Sidang Paripurna di DPR RI, Jumat pagi (18/10).

Jakarta (18/02) - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mendesak Pemerintah untuk segera menangani banjir yang sudah dua bulan tak kunjung usai di Lamongan. Hal itu disampaikannya menjelang mengikuti Sidang Paripurna di DPR RI, Jumat pagi (18/10).

"Ini ada masalah sense of crisis dari pemerintah yang lemah, mereka punya aparatur tetapi lemah dalam mengatur wilayah yang seharusnya menjadi tugasnya. Kalau berbicara tentang anggaran, kurang atau lebihnya anggaran itu relatif. Namun jangan sampai ada satu daerah yang

ternyata tidak diketahui kalau lagi mengalami kesusahan. Anggaran emergency Pemerintah bisa digunakan untuk kejadian darurat seperti ini", ujar Sigit.

Ia pun menyarankan jika masih ada sisa kontrak atau lelang tahun 2021 ataupun 2022, lebih baik dialokasikan untuk menangani banjir yang sudah dua bulan lamanya. Mengingat, banjir yang terjadi sudah sangat menyulitkan masyarakat.

"Banjir yang sudah sering terjadi membuat warga tidak bisa beraktivitas. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah akses

jalan poros desa, jalan poros kecamatan, dan sejumlah fasilitas umum. Banjir juga menghanyutkan ikan di tambak warga. Bahkan, anak-anak terpaksa belajar disekolah yang terendam banjir", ungkap Sigit.

Sebelumnya, BPBD Kabupaten Lamongan melaporkan, banjir Bengawan Njero telah menyebabkan tenggelamnya 2.413 rumah penduduk, 56 fasilitas pendidikan, 6 fasilitas kesehatan, 5970 hektar sawah tambak, 17 fasilitas ibadah, 45.267 km infrastruktur jalan, 6.287 jiwa terdampak di Kabupaten Lamongan. Kerugian material diperkirakan sedikitnya Rp29,4 miliar.



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur I

"Banjir yang sudah sering terjadi membuat warga tidak bisa beraktivitas. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan poros desa, jalan poros kecamatan, dan sejumlah fasilitas umum. Banjir juga menghanyutkan ikan di tambak warga. Bahkan, anak-anak terpaksa belajar disekolah yang terendam banjir"

Tanggapi Wadas dan JHT, Aleg PKS: Kebijakan Negara **Harus Adil** dan Memihak Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (18/02) -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pembangunan negara saat berkesempatan melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2022, Jumat Pagi, (18/02/2022).

Sukamta mengawali penyampaiannya dengan sebuah kisah Nabi Sulaiman dan pasukannya. Ia memaparkan bahwa DPR RI, selaku elemen negara yang memiliki kekuasaan seharusnya memetik pembelajaran dari Nabi Sulaiman yang memerintahkan untuk mengganti jalur pemberangkatan pasukannya untuk menyelamatkan semut, sebagai makhluk Tuhan. Dengan analogi yang sama, imbuhnya, sudah seharusnya DPR RI tidak mengabaikan hak warga kecil dalam melakukan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anggota Legislatif dari

Dapil Yogyakarta ini menyoroti pembangunan tambang batu di Wadas.

"Peristiwa pengelolaan lahan tambang di Desa Wadas, Purworejo, jangan sampai mengabaikan lingkungan dan kepentingan rakyat. Apapun kita harus dengan sabar, negara harus dengan sabar dan melindungi nasib mereka", tegasnya. Selain itu, Sukamta juga mengutarakan kekhawatirannya terkait dengan Jaminan Hari Tua (JHT) yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

"Begitu pula dengan para pekerja, yg sudah bekerja keras memeras keringat membangun Indonesia. Kita harus hormati

hak-haknya. Jangan sampai keinginan negara mengumpulkan dana yang besar, itu mengabaikan hak-hak mereka sehingga dana JHT harus ditahan sampai usia 56 tahun kalau memang mereka terpaksa berhenti bekerja di usia yg lebih dini", tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi I ini pun menutup pemaparannya dengan kembali mengingatkan betapa pentingnya memerhatikan hak seluruh warga Indonesia sebagai wujud keadilan.

"Negara ini sudah berdiri sejak lama, tugas kita adalah mengurangi kezoliman kepada rakyat, kepada lingkungan, kepada makhluk yang hidup di dalam NKRI ini. Karena itulah yang membedakan kita merdeka dan kita dijajah. Hari ini saya mengajak kita semua, mari mengisi kemerdekaan kita dengan menuju kepada keadilan, kita kurangi kezoliman" tutupnya.



H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

"Negara ini sudah berdiri sejak lama, tugas kita adalah mengurangi kezoliman kepada rakyat, kepada lingkungan, kepada makhluk yang hidup di dalam NKRI ini. Karena itulah yang membedakan kita merdeka dan kita dijajah. Hari ini saya mengajak kita semua, mari mengisi kemerdekaan kita dengan menuju kepada keadilan, kita kurangi kezoliman"

Perpres Nomor 110 Tahun 2021, Fraksi PKS: Perlu Ditinjau Ulang!

KUTIPAN

Jakarta (15/02) Anggota legislatif Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis, melakukan interupsi terkait Perpres Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 MA Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa siang, (15/02).

Politisi senior dari Fraksi PKS itu menyoroti isu terkait hak-hak masyarakat miskin yang terkikis akibat eksistensi Perpres Nomor 110 Tahun 2021. Menurutnya, Perpres tersebut menghilangkan dirjen penanganan masyarakat miskin yang seharusnya dipelihara oleh negara. Hal ini direfleksikan oleh ketidakjelasan penyaluran anggaran yang ditujukan untuk fakir miskin.

"Ketika diteliti, ternyata 25 Triliun anggaran dialihkan pada tupoksi badan pengelola bencana yang menurut saya tidak sehat dalam sistem anggaran kita. Bahkan, dana yang disalurkan tidak mencapai 60%" papar Iskan.

Selain hak fakir miskin,

anggota legislatif dari Dapil Sumatera Utara ini juga mengutarakan kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan status pendamping dalam penyaluran bantuan sosial.

2515 pendamping dari seluruh Kabupaten di Indonesia, termasuk dari Papua, melakukan aksi protes sampe hari ini untuk menuntut kejelasan status mereka. Padahal mereka mati-matian di sawah, di jalanan, serta di tempat-tempat lainnya untuk menyampaikan bantuan sosial. Bahkan, ada pendamping di Papua yang menyalurkan bantuan menggunakan helikopter" tegas Iskan.

Berperdoman pada dua alasan yang telah dipaparkan,

Iskan mengajukan permohonan untuk menyurati presiden untuk melakukan proses peninjauan atau pencabutan Perpres Nomor 110 Tahun 2021. Bukan hanya itu, anggota legislasi Komisi VIII ini juga menyayangkan bahwa Komisi VIII tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Perpres tersebut.

"Dan saya juga protes kalau memang ini direncanakan oleh bagian perencanaan nasional kenapa tidak dikonsultasi dengan DPR Komisi VIII karena komisi VIII merupakan leader sector yang mengawasi tentang pelaksanaan fakir miskin. Mohon supaya presiden disurati tentang perpres 110 tahun 2021" tutupnya.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Perpres tersebut menghilangkan dirjen penanganan masyarakat miskin yang seharusnya dipelihara oleh negara. Hal ini direfleksikan oleh ketidakjelasan penyaluran anggaran yang ditujukan untuk fakir miskin. Ketika diteliti, ternyata 25 Triliun anggaran dialihkan pada tupoksi badan pengelola bencana yang menurut saya tidak sehat dalam sistem anggaran kita. Bahkan, dana yang disalurkan tidak mencapai 60%"

Fraksi PKS **Sesalkan** Terbitnya Permenaker No. 2 Tahun 2022

KUTIPAN

Jakarta (15/02) – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifuddin melakuakan interupsi atas terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Alifuddin menegaskan bahwa Fraksi PKS menyesalkan terbitnya Permenaker 02 Tahun 2022 pada sidang Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (15/02).

"Kami Fraksi PKS Menyesalkan terbitnya Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 yang membatasi pencairan jaminan hari tua di BP Jamsostek di usia 56 tahun. Dengan aturan ini pekerja yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terlunta-lunta tanpa ada yang bisa menanggung", ujar Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat I.

Ia pun mebeberkan beberapa data, bahwa di masa pandemi Covid-19 banyaknya pekerja yang mengalami pemberhentian kerja sebagai

imbas dari usahanya survive dunia usaha.

"Data Kemenaker per Desember 2021 mencatat terdapat 72.000 yang mengalami PHK dan 4156 perusahaan melakukan PHK pekerjaanya. Situasi tersebut terjadi dikarenakan sebagai imbas Pandemi Covid-19 yang sangat memukul kondisi ekonomi sejumlah perusahaan yang berdampak juga pada ekonomi para pekerja, khususnya yang mengalami PHK", tutur Alifuddin.

Kemudian, Alifuddin menegaskan bahwa dana JHT adalah dana yang sangat bermanfaat bagi pekerja. Ia berpendapat berdasar pada laporan data yang disampaikan oleh BP Jamsostek per Desember 2021.

"BP Jamsostek melaporkan pada DPR RI sampai akhir desember 2021 adalah didominasi oleh 50% pekerja yang mengundurkan diri, dan 36 persen peserta yang ter-PHK dan hanya tiga persen yang mengajukan klaim karena memasuki usia pensiun. Data ini menunjukkan bahwa simpanan JHT masih menjadi penopang bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk melanjutkan kehidupan mereka", jelasnya.

Sebagai penutup, Alifuddin menyampaikan bahwa gelombang penolakan Permenaker ini di kalangan masyarakat, utamanya pekerja sangatlah luas. Ia juga menyebutkan data yang ada atas penolakan masyarakat di petisi online.

"Penolakan terhadap Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 ini sangat masif di kalangan masyarakat. dalam tiga hari petisi online mengenai penolakan Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 ini sudah 230.000 orang yang menandatangani petisi tersebut. Artinya dalam tiap hari ada yang menyuarakan penolakannya terhadap Permenaker ini", tutup Alifuddin.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

"Kami Fraksi PKS Menyesalkan terbitnya Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 yang membatasi pencairan jaminan hari tua di BP Jamsostek di usia 56 tahun. Dengan aturan ini pekerja yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terlunta-lunta tanpa ada yang bisa menanggung"



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Hadiri Acara di Dapil, Anis Byarwati bertemu Komunitas Senam Nusantara

KUTIPAN

Jakarta (15/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menghadiri acara Pelantikan Pengurus Senam Nusantara (KSN) DKI Jakarta, yang diselenggarakan Bidang Kepanduan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Ahad, (13/02/2022).

Acara ini diikuti para pimpinan PKS DPW DKI Jakarta, DPD PKS Jakarta Selatan, Anggota Legislatif PKS dari DPR RI dan DPRD DKI Jakarta serta semua pengurus Koordinator Daerah (KORDA) KSN dari lima DPD PKS se-DKI Jakarta.

Anis juga sebagai Pembina KSN DKI Jakarta mengatakan sehat merupakan anugerah Allah SWT yang sangat berarti pada hari-hari ini.

"Kondisi pandemi yang telah berjalan lebih dari dua tahun, mengisyaratkan akan segera berakhir pada akhir tahun 2021, namun Allah SWT mentakdirkan, kasus penularan kembali meningkat sejak awal

bulan Februari 2022", tuturnya.

Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1 Jakarta Timur ini menambahkan, bahwa Satgas Covid-19 pada Sabtu, (12/02/2022) mencatat, secara nasional sejumlah 4.763.252 orang terpapar Covid-19 dan 1.053.036 diantaranya adalah penduduk DKI Jakarta.

Dalam sehari yaitu pada tanggal 12 Februari 2022, kasus bertambah 55.209 orang. Dan 12.417 kasus tercatat terjadi di DKI Jakarta.

"Kondisi ini tentu membuat kita semua prihatin. Karena aktivitas warga pasti terganggu dan berdampak pada

terganggunya aktivitas lain seperti aktivitas ibadah dan juga aktivitas ekonomi," paparnya.

Maka, Anis memberikan apresiasi kepada Bidang Kepanduan yang bisa menghadirkan Komunitas Senam Nusantara (KSN), khususnya di DKI Jakarta.

"Program ini adalah bagian dari dakwah. Dakwah yang berarti mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan dalam konteks KSN adalah menjadi sehat," tandasnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mengakhiri sambutannya dengan menegaskan bahwa senam merupakan olah raga yang murah, meriah dan dapat dilakukan oleh semua usia, semua lapisan masyarakat.

"Ini menjadi kontribusi PKS dalam upaya menyelamatkan masyarakat dan mengajaknya untuk hidup sehat, guyub, akur dan hangat," pungkas Anis mengakhiri.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Kondisi pandemi yang telah berjalan lebih dari dua tahun, mengisyaratkan akan segera berakhir pada akhir tahun 2021, namun Allah SWT mentakdirkan, kasus penularan kembali meningkat sejak awal bulan Februari 2022"



Berada di Dapil, Syaikh Serahkan Bantuan Meja Kursi untuk Sekolah Ma'arif PCNU Karawang

KUTIPAN

Dengan fasilitas ini, Syaikh berharap kualitas pendidikan di sekolah akan semakin meningkat dan menghasilkan siswa yang cerdas dan berakhlak mulia.

Karawang (15/02) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikh menyerahkan bantuan meja dan kursi untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Aliyah (MA) Ma'arif, Kota Baru, Karawang, Ahad (13/02/2022).

"Meja dan kursi sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar-mengajar," ujar Syaikh.

Dengan fasilitas ini, Syaikh berharap kualitas pendidikan di sekolah akan semakin meningkat dan menghasilkan siswa yang cerdas dan berakhlak mulia.

"Insya Allah ini akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah," kata Syaikh.

Menurut Syaikh, PKS dan NU memiliki kepedulian yang sama terhadap dunia

pendidikan. Apalagi di Era Digital saat ini.

"Kita harus menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan digitalisasi di semua aspek kehidupan. Dan itu adalah tugas kita bersama dan perlunya untuk berkolaborasi," tutur Syaikh.

PKS, tambah Syaikh, banyak belajar dari NU dalam hal ini. Karena NU telah lama hadir memberikan sumbangsinya bagi dunia pendidikan di Tanah Air. Dari sebelum kemerdekaan hingga hari ini.

"NU adalah guru PKS. Kami banyak belajar dari NU," tegas Syaikh.

Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang Kyai Kamaludin memberikan

apresiasi atas bantuan ini.

"Saya sampaikan soal kebutuhan kursi meja kepada Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Pak Budiwanto. Alhamdulillah sekarang sudah terealisasi," ungkapnya.

MTs dan MA Ma'arif dikelola oleh PCNU. Hadir pula dalam acara ini Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang Kyai Dedi Jubaidi.

Kegiatan ini merupakan agenda Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kundapil) Syaikh sebagai Anggota DPR RI. Berlangsung dari 11-13 Februari.



H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Meja dan kursi sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar-mengajar, Insya Allah ini akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah"



Nur Azizah Salurkan Program Kemaslahatan BPKH Untuk Ponpes di Dapil

KUTIPAN

Depok - Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A salurkan Program Kemaslahatan, BPKH Bersama DT Peduli berupa Bantuan Genset type V-gen 80 KVA Pada Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Qur'an, Kota Depok, Jumat (11/02).

Sebagai Anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Nur Azizah mengawal ajuan program Kemaslahatan yang sudah di ajukan Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Qur'an setelah hampir dua tahun lamanya. "Alhamdulillah setelah hampir 2 tahun ajuan program kemaslahatan yang sudah di ajukan MQ Kepada BPKH melalui Daarut Tauhid (DT) Peduli sudah dapat realisasi si hari ini berupa 1 unit Genset type V-gen 80 KVA, semoga bermanfaat", jelas Nur Azizah

Pada kesemlatan ini, serah terima Genset type V-gen 80 KVA dilakukan oleh, Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesejahteraan & Kemaslahatan, Dr. Rahmat Hidayat, S.E, M.T yang

hadir secara virtual mewakili BPKH kepada Pembina Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Qur'an KH. Khoirul Muttaqin, Lc. Al-Hafizh di Jl. Al Hidayah No.20, RT.05/RW.02, Jatimulya,Kec. Cilodong,Kota Depok, Jawa Barat.

Kegiatan serah tera ini turut dihadiri secara virtual, oleh Deputi Bidang Kesekretariatan Badan & Kemaslahatan BPKH, Emir Rio Khrisna, S.T, M.B.A, M.Sc.,

Kepala Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan, Dr. Agung Sri Hendarsa., Kepala Divisi Monev Program Kemaslahatan BPKH, Indriayu Afriana, S.Pd., MSM. Serta Direktur Program DT Peduli, Muhammad Ihsan, S.Pd., M.Si.

Pembina Yayasan Madinatul Qur'an KH. Khoirul

Muttaqin mengucapkan terima kasih kepada Nur Azizah yang telah mengawal ajuan Ponpes MQ kepada BPKH, setelah sekian lama menanti, akhirnya dapat ada realisasi. Ia menurutkan, bantuan Genset akan sangat bermafaat untuk kegiatan operasional maupun pembelajaran para santri di Yayasan Madinatul Qur'an.

"Pesantren Madinatul Qur'an punya 400 santri penghafal Alquran, sehingga bantuan Genset ini insya Allah tepat sasaran karena sangat menunjang aktifitas pesantren. Semoga ini menjadi amal sholeh untuk kita semua," kata KH. Khoirul Muttaqin.

Dalam sambutannya, Nur Azizah mengaku merasa bersyukur apa yang diperjuangkannya bisa di setujui oleh BPKH yang punya kewanangan untuk mewujudkan.

"Sebagai pemberi rekomendasi pada Pesantren Madinatul Quran bantuan program kemaslahatan BPKH saya ucapkan Baarakallahu fiik semoga menjadi berkah penuh manfaat yang Panjang bagi kemajuan Pendidikan, mencetak generasi unggul penerus peradaban yang



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Alhamdulillah setelah hampir 2 tahun ajuan program kemaslahatan yang sudah di ajukan MQ Kepada BPKH melalui Daarut Tauhid (DT) Peduli sudah dapat realisasi hari ini berupa 1 unit Genset type V-gen 80 KVA, semoga bermanfaat"

beriman bertaqwa berbakti pada agama negara dan bangsa.

Kepada BPKH, saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, semoga jerih usahanya mengemban Amanah untuk kemaslahatan masyarakat, agama dan bangsa menjadi catatan kebaikan di sisi Allah SWT," kata Nur Azizah.

Hal senada disampaikan Rahmat Hidayat yang berharap bantuan Genset tersebut akan

bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan mendukung kelancara para santri dalam belajar Alquran.

"Proses realisasi program ini cukup lama karena banyaknya proposal yang masuk dan BPKH sangat hati-hati serta teliti agar program-program Kemaslahatan BPKH tepat sasaran." Pungkas Rahmat Hidayat.

Roadshow di Dapil, Nevi Zuairina Lakukan Lima Kegiatan Dalam Satu Pekan

KUTIPAN

Pasaman Barat (15/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nevi Zuairina kembali menggelar kunjungan ke daerah pemilihan pada Jumat hingga Minggu pekan lalu.

Menurut Nevi, kunjungan ke Dapil kali ini difokuskan untuk menjangkau aspirasi di beberapa lokasi yang menjangkau lima titik kegiatan.

Hari pertama roadshow dijalani Nevi dengan menggelar pertemuan dengan Jajaran Pengurus P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang.

Kegiatan ini sendiri juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat periode 2010 - 2021 silam, Prof Dr. Irwan Prayitno yang tak lain suami Nevi sendiri.

Usai menggelar pertemuan dengan jajaran Pengurus P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, Politisi PKS itu melanjutkan roadshownya ke Nagari Cubadak Kecamatan untuk membagikan ratusan

paket sembako kepada masyarakat di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Mantan Ketua Tim Penggerak PKK Sumbang itu juga mengajak warga masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

Nevi juga mengajak warga masyarakat untuk terus berdoa agar pandemi Covid-19 yang tengah melanda dapat segera berakhir.

"Tentunya, sekaligus saya berharap didoakan agar tetap sehat agar mampu mengemban amanah masyarakat di Dapil Sumbang Dua di Senayan Jakarta sebagai wakil dari konstituen saya di daerah" ujarnya.

Perjalanan kunjungan ke daerah pemilihan kembali

dilanjutkan dengan menggelar silaturahmi dengan penerima bantuan RTLH di Nagari Simpang Tonang Duo Koto Pasaman.

Kepada penerima bantuan, Nevi menyebutkan bahwa bantuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diserahkan harus dapat dimanfaatkan dan berguna bagi keluarga yang menempati.

"Tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi, karena itu, saya sebagai wakil rakyat harus siap bekerja membantu warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan bersih," ujarnya.

Kegiatan Anggota Legislatif itu terus berlanjut dengan dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Ma'ali Muhammadiah di Nagari Talu Kabupaten Pasaman.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Alhamdulillah, dalam waktu singkat, saya dapat mengunjungi banyak tempat di Daerah Pemilihan, bertemu masyarakat dan dapat menyalurkan beberapa manfaat untuk rakyat Sumbang. Masih banyak titik atau tempat yang perlu kami hadir dan bergantian InshaAllah dapat terwujud menjangkau seluruh daerah pemilihan di Sumatera Barat II"



Profil

- Nama Lengkap
Hj. Nur Azizah Tamhid, BA, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
Blitar, 18 September 1954
- Dapil
Jawa Barat VI
(Kota Depok & Kota Bekasi)



Pendidikan

- Tk Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Salafiyah Syafiyah Khairiyah Hasyim. (Ponpes Seblak-Jombang Jawa Timur)
- Sarjana Muda Fak. Tarbiyyah, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng - Jombang - Jatim
- S2 : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta



Riwayat Pekerjaan

- Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1995-2010.
- Guru Dan Pembina Ponpes Miftahul 'Ulum Jakarta.
- Guru Mts. Salafiyah Syafiyah Khairiyah Hasyim Jombang, 1973-1980.
- Anggota DPR RI FPKS, 2019-2024



Keluarga

- Suami : **Prof. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc**
Anak : **1 orang laki-laki,**
2 orang perempuan



Riwayat Organisasi

- Ketua TP PKK Kota Depok, 2006-2016
- Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Depok, 2007-2016
- Pembina Forum Kota Depok Sehat (FKDS), 2010-2016
- Ketua P2TP2A Kota Depok, 2010-2016
- Ketua Forum Paud Kota Depok, 2014-2016
- Ketua Dekranasda Kota Depok 2006-2011 dan 2011-2016.

NUR AZIZAH TAMHID



Media Sosial

- f **Nur Azizah**
- @ **nur.azizah.tamhid**
- **Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A**



Penghargaan

- Penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Nasional dari BKKBN, 2012
- Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri), 2012
- Adikarya Pangan Nusantara (Kementan), 2011

Kunjungi Dapil, Andi Akmal Ikuti Dialog Publik Menakar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone

KUTIPAN

Watampone (10/02) --- Melalui kegiatan dialog publik yang difasilitasi Wartawan Independen Bone (WIB) dilaksanakan di Hotel Helios Watampone

Andi Akmal Pasluddin, yang merupakan salah satu narasumber dari kegiatan dengan tema 'Menakar Pertumbuhan Ekonomi Bone ke Depan' menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Beberapa hal tersebut disampaikan diantaranya perbanyak peredaran uang bisa dengan melalui kredit usaha-usaha rakyat, jadi ketika ada orang yang mau berusaha minimal mereka difasilitasi dengan modal.

"Ekonomi kita bisa meningkat bila infrastruktur kita baik. Oleh karena hal ini harus menjadi perhatian demi kelancaran distribusi perekonomian dari usaha yang dilaksanakan warga Bone", tutur Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Andi Akmal menambahkan, bahwa wilayah Bone ini masih banyak hal yang perlu dikembangkan karena dukungan Sumber Daya Alam yang mumpuni.

"Untuk itu, perlu perbanyak investor yang masuk agar menanamkan usahanya, melalui jalan ini usaha nanti bisa menyerap tenaga kerja dan bisa memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak," ungkapnya.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa hal yang sangat penting adalah meningkatkan sektor pertanian. Dimana sektor ini adalah salah satu penyumbang terbesar dalam mendorong kenaikan perbaikan perekonomian kita.

"Bone itu luas wilayah pertaniannya. Untuk itu bidang ini harus menjadi salah satu

prioritas untuk memberikan pembinaan dalam peningkatan pangan, terutama ketika petani memasuki musim tanam pemerintah harus melayani dengan penyediaan pupuk agar produksi mereka bisa maksimal", ungkap Akmal.

Pemerintah, imbuh Akmal, juga harus bisa mendorong untuk memperluas lahan pertanian dengan membuka lahan yang baru sebagai dampak adanya konversi lahan pertanian yang digunakan sebagai kawasan perumahan.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah, menyediakan alat pengering padi yang memadai seperti yang ada di kabupaten lain. Dan tentunya yang sangat diharapkan dari masyarakat petani adalah jaminan kestabilan harga yang baik, yang tidak diganggu dengan importasi ketika panen raya. Ketika produksi masyarakat petani berhasil, maka perekonomian mereka bisa meningkat pula", pungkash Andi Akmal Pasluddin.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Bone itu luas wilayah pertaniannya. Untuk itu bidang ini harus menjadi salah satu prioritas untuk memberikan pembinaan dalam peningkatan pangan, terutama ketika petani memasuki musim tanam pemerintah harus melayani dengan penyediaan pupuk agar produksi mereka bisa maksimal",



Bukhori Kawal Percepatan Penyaluran Bansos di Dapil

KUTIPAN

Semarang (10/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori, mengawal percepatan penyaluran bansos BPNT dan PKH bagi penerima manfaat yang tersebar di daerah pemilihan Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal, Sabtu-Minggu (05-06/02/2022).

Diwakili oleh tim dapil, tim Bukhori yang didampingi oleh pihak Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat melakukan pengawasan terhadap penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh pihak Himbara kepada calon penerima manfaat bantuan BPNT dan PKH di sejumlah wilayah.

Dari data yang berhasil dihimpun, misalnya tercatat sebanyak 1427 KKS di Kabupaten Kendal belum tersalurkan. Kemudian di Kota Salatiga tercatat sebanyak 800 KKS yang belum diserahkan.

“Terdapat sejumlah faktor yang membuat KKS ini tidak

kunjung diterima oleh calon penerima manfaat hingga saat ini kendati program tersebut merupakan dana sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial. Misalnya, temuan data ganda, KKS yang tertukar, calon penerima manfaat adalah orang mampu, pindah domisili, dan ada yang ternyata sudah meninggal,” beber Bukhori saat ditemui di Jakarta.

Bukhori menjelaskan, program percepatan penyaluran KKS merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja antara Menteri Sosial dan Komisi VIII DPR RI pada 19 Januari 2022. Dalam rapat tersebut Menteri

Sosial mengungkapkan anggaran senilai Rp2,7 Triliun yang merupakan dana bansos masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himbara. Mensos pun mengajak para anggota DPR Komisi VIII bersama Kementerian Sosial untuk menyalurkan KKS yang masih tertahan di bank untuk diserahkan kepada penerima manfaat di masing-masing dapil.

“Kami menyambut positif ajakan Mensos ini. Hak masyarakat atas bansos yang selama ini tertahan harus segera diserahkan tanpa dikurangi sedikitpun. Ke depan, saya berharap pihak himbara bisa lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan Kemensos maupun Dinsos dalam memvalidasi data calon penerima manfaat. Sehingga, mereka yang sudah betul-betul terdata memenuhi kualifikasi bisa dapat segera diproses dan menerima bantuan,” pungkasnya.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

“Terdapat sejumlah faktor yang membuat KKS ini tidak kunjung diterima oleh calon penerima manfaat hingga saat ini kendati program tersebut merupakan dana sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial. Misalnya, temuan data ganda, KKS yang tertukar, calon penerima manfaat adalah orang mampu, pindah domisili, dan ada yang ternyata sudah meninggal,”

Hadiri Agenda di Dapil, Abdul Kharis: Indonesia Laboratorium Antropologi Terbesar Dunia

KUTIPAN

Boyolali (14/02) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menghadiri Sarasehan Sejarah dan Budaya dengan tema 'Penggeng Untuk Indonesia' yang berlangsung di Padepokan Aji Tirta Wening Penggeng, Boyolali pada Minggu (13/02/2022).

Boyolali (14/02) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menghadiri Sarasehan Sejarah dan Budaya dengan tema 'Penggeng Untuk Indonesia' yang berlangsung di Padepokan Aji Tirta Wening Penggeng, Boyolali pada Minggu (13/02/2022).

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama FEBI UNS, Pusat Kajian Sejarah Lontar Nusantara dan Padepokan Aji Tirta Wening.

Sarasehan Budaya ini menghadirkan narasumber Direktur Pusat Kajian Sejarah Lontar Nusantara Kasori Mujahid dan Kurator Senior Keris Surakarta, Benny

Hatmantoro.

Dihadiri juga oleh puluhan undangan yang terdiri dari Tokoh Masyarakat Penggeng, para pemerhati sejarah dan pecinta budaya Surakarta. Tampak hadir pula Wakil Pimpinan DPRD kota Surakarta Sugeng Riyanto dan Pegiat Komunitas Sutresna Tosan Aji "Nunggak Semi", Suparjito.

Acara ini diawali dengan sambutan selamat datang oleh Pengampu Padepokan Aji Tirta Wening yang juga Dekan FEBI UNS Surakarta, Djoko Suhardjanto.

"Padepokan ini, terbuka untuk kegiatan budaya, karena ini merupakan komitmen kami

guna mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan" ucap Djoko menutup sambutannya.

Berperan sebagai Keynote Speaker, Abdul Kharis sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan semacam ini.

"Saya siap memfasilitasi jika kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara periodik", ucapnya.

Kharis mengatakan bahwa Indonesia adalah laboratorium antropologi terbesar di dunia.

"Dengan status sebagai negara kepulauan terluas di dunia, dihuni lebih dari 300 suku bangsa dan sekitar 64 ribuan lebih peninggalan purbakala di Indonesia, kalau anak bangsa tidak mau mempelajari dan mengkajinya, lama kelamaan kita akan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa", tandasnya.

Kharis melanjutkan bahwa kajian sejarah dan budaya semacam ini harus terus digalakkan untuk dapat melihat jejak-jejak sejarah dan peran tokoh dimasa lalu dalam membangun peradaban.

"Apalagi tema kali ini, dari



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

"Indonesia adalah laboratorium antropologi terbesar di dunia. Dengan status sebagai negara kepulauan terluas di dunia, dihuni lebih dari 300 suku bangsa dan sekitar 64 ribuan lebih peninggalan purbakala di Indonesia, kalau anak bangsa tidak mau mempelajari dan mengkajinya, lama kelamaan kita akan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa"

sebuah desa di Kabupaten Boyolali disorot perannya bagi ke Indonesia, pasti ada sesuatu yang istimewa untuk digali dan diambil pelajaran. Dr. Kasori dan Bopo Benny nanti akan

membedah dan menguraikan lebih mendalam. Selamat mengikuti sarasehan!", pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Terima Aspirasi dari Koordinator Daerah dan Pendamping Bansos Kemensos,

Aleg PKS: Kami Akan Suarakan dan Perjuangkan

KUTIPAN

Jakarta (15/02) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, berjanji akan meneruskan aspirasi dari Koordinator Daerah (Korda) dan Pendamping Bansos Kemensos di seluruh Indonesia yang terdampak kebijakan Kementerian Sosial RI, pada agenda Hari Aspirasi FPKS, Selasa pagi (15/09).

Menurutnya, kejelasan status, ketepatan pembayaran gaji, dan kepastian bekerja bagi seluruh Korda dan Pendamping Bansos harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh pihak, khususnya Kementerian Sosial sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) PPKM.

"Hal ini menjadi catatan yang perlu kita perjuangkan. Soal status kerja dan kejelasan program", ungkap Iskan.

Iskan pun melanjutkan bahwa ia akan meneruskan aspirasi tersebut dalam Sidang Paripurna di DPR RI, siang ini,

sekalius menyampaikan keluhan dari para Korda dan Pendamping Bansos dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemensos.

"Saya akan lantang menyuarakan ini dalam RDP-RDP. Nanti jam 10, ada Paripurna juga, saya akan interupsi di sana, InsyaAllah", jelas Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara tersebut.

Selain itu, Iskan juga bersedia memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Korda dan Pendamping Bansos dengan Menteri Sosial, agar mereka bisa menyampaikan keluhan secara langsung guna

mendapat jalan keluar terbaik.

"Silakan, nanti saya akan berkirim surat langsung kepada Menteri untuk pertemuan dengan beliau", jelas Iskan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos RI dihapus Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Akibatnya, sebanyak 514 Koordinator Daerah (Korda) dan 7.230 Pendamping BSP Kemensos RI kehilangan pekerjaannya.

Mereka yang terancam pengangguran itu terdiri dari Korda Bansos Pangan yang diangkat untuk setiap Kabupaten/Kota dan Pendamping Bansos Pangan/BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) yang diangkat di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Kejelasan status, ketepatan pembayaran gaji, dan kepastian bekerja bagi seluruh Korda dan Pendamping Bansos harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh pihak, khususnya Kementerian Sosial sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) PPKM. Hal ini menjadi catatan yang perlu kita perjuangkan. Soal status kerja dan kejelasan program"

Dukung Petisi dan Uji Materi UU IKN, HNW: Kenegarawanan Hakim MK Wajar Mengabulkannya

KUTIPAN

Jakarta (10/02) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendukung langkah banyak warga untuk mempergunakan kedaulatannya secara konstitusional dengan menyelenggarakan Petisi menolak pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara pada periode 2022-2024.

Menurut Hidayat, sampai Kamis pagi (10/02/2022) sudah ditandatangani oleh lebih dari 24.500 warga. Ia juga mendukung tokoh-tokoh bangsa yang mempergunakan hak konstitusionalnya mengajukan permohonan uji materi UU Ibukota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan berharap para hakim MK akan menghadirkan kenegarawanan dengan mengabulkan permohonan tersebut.

“Salah satu syarat untuk menjadi hakim MK adalah negarawan. Dan saya berharap sembilan hakim MK yang ada

sekarang akan memaksimalkan sifat kenegarawanan tersebut. Sehingga hakim MK terbebas dari kepentingan ataupun pressure politik, dan akan betul-betul mengadili perkara tersebut secara objektif,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (10/02).

HNW sapaan akrabnya mengatakan antusiasme Warga dan tokoh masyarakat menginisiasi dan menandatangani Petisi, dan keberanian sejumlah tokoh bangsa mengajukan JR ke MK, diantaranya adalah yang tergabung dalam Poros Nasional Keadulatan Negara

(PNKN), sudah sangat menggambarkan sikap konstitusional banyak warga yang tidak menyetujui pemindahan Ibukota dan UU IKN. Dan bahwa mereka mengajukan uji materi UU IKN ke MK juga sangat tepat dan wajar, karena memang begitulah koridor konstitusional yang ada.

“Padahal seharusnya, sebagaimana juga materi petisi dan pengajuan judicial review ke MK, Pemerintah memberlakukan asas prioritas, dan fokus untuk keselamatan warga dan negara dari pandemi covid-19, bukan justru malah membuat project baru yang tidak urgent, yang ternyata tidak sebagaimana disampaikan dimuka, proyek IKN itu akan membebani APBN juga, padahal lebih bagus kalau anggaran tersebut bila ada, digunakan untuk selamatkan Rakyat dan Negara untuk recovery dari Covid-19 dan dampak-dampaknya.”

HNW sangat mendukung permohonan uji materi UU IKN tersebut yang diajukan oleh banyak tokoh yang kredibel dan



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

“Salah satu syarat untuk menjadi hakim MK adalah negarawan. Dan saya berharap sembilan hakim MK yang ada sekarang akan memaksimalkan sifat kenegarawanan tersebut. Sehingga hakim MK terbebas dari kepentingan ataupun pressure politik, dan akan betul-betul mengadili perkara tersebut secara objektif”

dengan track record mereka yang sangat cinta bangsa dan negara, baik dari kalangan sipil maupun purnawirawan, seperti Marwan Batubara, Abdullah Hefamahua,

Muhyidin Junaidi, Letjend TNI (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***